

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**KOORDINASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
(PUPR) DENGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
(DLHK) DALAM MENANGANI MASALAH BANJIR DI KECAMATAN
TAMPAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



ANNISA ANGGRAINI
NPM : 167110870

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Annisa Anggraini
NPM : 167110870
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata 1/S1
Judul Skripsi : Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang (PUPR) Dengan Dinas
Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK)
Dalam Menangani Masalah Banjir Di Kecamatan
Tampar

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif dalam memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 8 November 2020

Pembimbing

Dr. H. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui :
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Lilis Suryani S,Sos, M,Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Annisa Anggraini
NPM : 167110870
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata 1/S1
Judul Skripsi : Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang (PUPR) Dengan Dinas
Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK)
Dalam Menangani Masalah Banjir Di Kecamatan
Tampan

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 8 November 2020

Ketua



Dr. H. Moris Adidi Yoga, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Andri Kurniawan B.PM, M.Si

Anggota



Eko Handrian S.Sos, M.Si

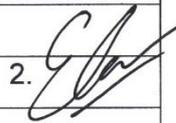
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

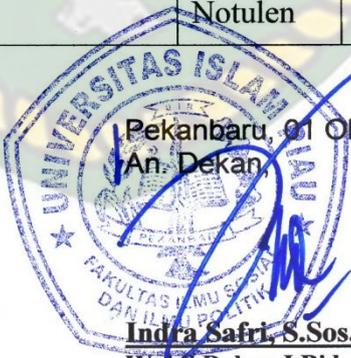
BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 926/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 30 September 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 01 Oktober 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Annisa Anggraini
N P M : 167110870
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Menangani Masalah Banjir Di Kecamatan Tampan**
Nilai Ujian : Angka : " 77 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr.Moris Adidi Yogia, M.Si	Ketua	1. 
2.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Andri Kurniawan.B.PM., M.Si	Anggota	3. 
4.		Notulen	4.

Pekanbaru, 01 Oktober 2020
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 926/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Annisa Anggraini
N P M : 167110870
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Menangani Masalah Banjir Di Kecamatan Tampian

Struktur Tim :

1. Dr.Moris Adidi Yogia, M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Eko Handrian, S.Sos., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Andri Kurniawan.B.PM., M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 01 Oktober 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Annisa Anggraini
NPM : 167110870
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata 1/S1
Judul Skripsi : Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang (PUPR) Dengan Dinas
Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK)
Dalam Menangani Masalah Banjir Di Kecamatan
Tampan

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 8 November 2020

Ketua



Dr. H. Moris Adidi Yogya, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Andri Kurniawan B.PM, M.Si

Turut Menyetujui :

Wakil Dekan 1



Indra Syafri S.Sos, M.Si

Program Studi Ilmu
Administrasi Publik



Lilis Suryani S.Sos, M.Si.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat mu Ya Allah, alhamdulillah skripsi ini telah selesai.

Terima Kasih Ya Allah atas segala rahmat dan nikmat mu, hingga hamba telah melalui masa-masa perkuliahan dengan baik

Terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda dan Ibunda tersayang yang telah mendukung saya sepenuhnya

Kepada kakak dan adik tersayang, terima kasih atas dukungan yang kalian berikan

Dan kepada teman-teman terbaik khususnya AP D angkatan 2016, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan semasa kuliah

Semoga skripsi ini berguna dan menjadi referensi bagi teman-teman yang membutuhkan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt karena berkat rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Menangani Masalah Banjir Di Kecamatan Tampan” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dalam penulisan skripsi ini tentu nya tidak luput dari kesulitan, namun dukungan dan bantuan dari berbagai pihak dapat sangat mempengaruhi dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan dengan tulus dan ikhlas rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL yang telah menyediakan fasilitas di lingkungan Lembaga Pendidikan Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibuk Lilis Suryani, S.Sos, M,Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
5. Bapak Dr. Nurman, S.Sos., M.Si selaku Penasehat Akademik (PA)
6. Bapak/Ibu Dosen Ilmu Administrasi Publik yang telah memfasilitasi serta memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dan Pegawai Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang telah memberikan izin serta data yang membantu penulis dalam menyusun Skripsi ini.
8. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Sampah Serta Pegawai Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan yang

telah memberikan izin serta data yang membantu penulis dalam menyusun Skripsi ini.

9. Kepada Ayahanda dan Ibunda tersayang yang telah memfasilitasi baik dari segi material dan non material serta doa dan dukungannya terhadap penulis, dan Kakak yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, serta Adik yang selalu memberikan semangat terhadap penulis.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016, terkhusus kelas AP (D) yang sangat membantu dalam memberikan motivasi dan dukungan penuh terhadap penulis.

Penulis bermohon kepada Allah Swt agar jasa-jasa baik yang telah diberikan kepada penulis dibalas pahala. Aamiinn yaa robbal 'alamin.

Demikian skripsi ini penulis buat agar berguna bagi penulis sendiri, dan juga bermanfaat serta menambah wawasan dan membuka cakrawala bagi para pembaca.

Pekanbaru, 8 November 2020

Penulis

Annisa Anggraini

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHEMSIF	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan & Kegunaan Penelitian	16
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	18
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Konsep Administrasi.....	18
2. Konsep Organisasi	21
3. Konsep Manajemen.....	24
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	27
5. Konsep Koordinasi	30
6. Konsep Drainase	38
B. Kerangka Pikir	42
C. Konsep Operasional	43
D. Operasionalisasi Variabel.....	45
BAB III : METODE PENELITIAN	47
A. Tipe Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Key Informan	48
D. Teknik Penarikan Informan.....	49
E. Jenis Dan Sumber Data	49
F. Teknik Pengumpulan Data	50
G. Teknik Analisis Data.....	51
H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	53
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	56
A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru	56
B. Profil Kecamatan Tampan.....	57

C. Gambaran Umum Dinas PUPR.....	58
D. Gambaran Umum Dinas DLHK.....	73

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 78

A. Identitas Responden	78
B. Pembahasan Indikator Variabel Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Dalam Menangani Masalah Banjir Di Kecamatan Tampan.....	80
C. Analisis Hasil Penelitian Tentang Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Dalam Menangani Masalah Banjir Di Kecamatan Tampan.....	112
D. Faktor- Faktor Penyebab Buruknya Sistem Drainase	124
E. Penghambat Dan Upaya Untuk Mengatasi Masalah Banjir Di Kota Pekanbaru.....	125

BAB VI : PENUTUP 127

A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	128

DAFTAR KEPUSTAKAAN 129

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Data Titik Drainase Bermasalah dan Kedalaman Banjir Kec. Tampan Tahun 2018.....	4
I.2 : Data Kedalaman Banjir Tahun 2016-2018.....	4
II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Dalam Menangani Masalah Banjir Di Kecamatan Tampan.....	45
IV.1 : Jumlah Penduduk menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tampan, 2018.....	58
V.1 : Identitas Key Informan.....	78
V.2 : Identitas Responden.....	79
V.3 : Jumlah Satuan Tugas Penanganan Banjir.....	103
V.4 : Daftar Instansi Koordinasi Dinas PUPR.....	105
V.5 : Hasil dan Temuan Penelitian.....	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Dalam Menangani Masalah Banjir Di Kecamatan Tampan	42
IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).....	72
IV.2 : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).....	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Daftar Wawancara Penelitian Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Menangani Masalah Banjir Di Kecamatan Tampan	132
2 : Dokumentasi Penelitian Tentang Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Menangani Masalah Banjir Di Kecamatan Tampan	136
3 : Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Nomor:770/UIR-Fs/Kpts/2019	142
4 : Surat Keterangan Penelitian Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/190 Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tentang Penelitian Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Menangani Masalah Banjir Di Kecamatan Tampan.....	143
5 : Surat Keterangan Balasan Penelitian Dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR)	144
6 : Surat Keterangan Balasan Penelitian Dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK).....	145

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Anggraini
NPM : 167110870
Jurusan : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata 1/S1
Judul Skripsi : Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Menangani Masalah Banjir Di Kecamatan Tampan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhannya diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 November 2020

Annisa Anggraini

**KOORDINASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DENGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DALAM
MENANGANI MASALAH BANJIR DI KECAMATAN TAMPAN**

ABSTRAK

Oleh : Annisa Anggraini

Kata kunci : koordinasi, banjir

Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Kota Pekanbaru adalah daerah yang masih sering terjadi banjir. Untuk mewujudkan Kota Pekanbaru yang bebas banjir, ramah lingkungan dan terjaga kebersihannya, perlunya koordinasi antara Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Proses Komunikasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menangani masalah banjir di Kota Pekanbaru, khususnya Kecamatan Tampan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan analisa deskriptif, dan lokasi penelitian adalah di Kecamatan Tampan. Informan penelitian ditentukan dengan teknik snowball sampling. Hasil dari penelitian ini adalah koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah kurangnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, pembangunan pemukiman dan pertokoan yang tidak mengindahkan aturan yang berlaku, minimnya anggaran akibat rasionalisasi untuk program pengendalian banjir, belum adanya master plan penanganan banjir.

**COORDINATION DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND SPATIAL
PLANNING OFFICE WITH DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND
CLEANLINESS SERVICE IN DEALING ON HANDLE FLOOD IN
TAMPAN DISTRICT**

ABSTRACT

By: Annisa Angraini

Key words: coordination, flood

Coordination is about the organization to arrange or activity that rules and action would not conflict or confuse. Pekanbaru City is the area is still common flood. To create the city of Pekanbaru free flooding, friendly environment and awake cleanliness, need to coordination between the Department of Public works and spatial planning office with the Department of Environment and cleanliness service in dealing. This study aims to analyze Communications Process between the Department of Public works and spatial planning office with the Department of Environment and cleanliness service in dealing in addressing the problem of the flood in the Pekanbaru City, especially Tampan District. This research is kualitatif with analysis of the descriptive, and the location of the research is District Tampan. Informants research determined by a snowball sampling. The result of this research is coordination carried out by the Department of Public works and spatial planning office with the Department of Environment and cleanliness service in dealing is the lack of awareness of maintaining the cleanliness of the environment, the development of the settlement and the shopping matters no heed the rules of true, lack of the budget due to rasionalisasi for the control of the flood, there is not handle of the flood plan master.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi merupakan faktor yang paling utama bagi suatu organisasi ataupun negara dalam penyelenggaraan kehidupan sehari-hari. Maju mundurnya suatu negara, tergantung pada baik atau tidaknya sistem administrasi yang dilaksanakan. Apabila administrasi dalam negara tersebut dilakukan dengan baik, maka usaha untuk tercapai tujuannya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kerja.

Indonesia adalah sebuah negara berkembang di Asia Tenggara, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Pertumbuhan penduduk berkembang sangat cepat setiap tahunnya. Namun sangat lambat dalam hal pembangunan. Salah satunya adalah Provinsi Riau. Riau adalah sebuah provinsi di pulau Sumatera yang ibukotanya adalah Kota Pekanbaru. Pekanbaru dalam tahap pembangunan dalam segala bidang. Salah satu pembangunan yang masih belum selesai adalah pembangunan sistem drainase. Drainase sangat berpengaruh dalam lingkungan kehidupan sehari-hari.

Peristiwa banjir akan terjadi ketika suatu saluran tidak dapat menampung debit air yang masuk karena dimensi saluran terlalu kecil dan seharusnya yang dikarenakan kesalahan drainase atau berkurangnya daerah tangkapan air. Selain itu terjadinya banjir juga dapat dipengaruhi oleh perubahan iklim yang mengakibatkan banjir dalam kurun waktu tertentu sehingga terjadi luapan air yang berlebih. (sumber: jurnal, Wahyu Permadi:2016)

Banjir masih terus terjadi di kota Pekanbaru, terutama di daerah Kecamatan tampan. Apabila terjadi curah hujan yang cukup tinggi dipastikan mempengaruhi kondisi jalan dan drainase. Jika hujan lebat maka air tergenang di jalan. Kecamatan tampan merupakan daerah yang paling sering terjadi banjir. Kecamatan tampan adalah daerah yang cukup ramai penduduknya dan daerah ini terdapat dua universitas negeri, yaitu Universitas Riau dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Daerah ini menjadi daerah penduduk terbanyak dan menjadi pusat pendidikan di kota Kecamatan tampan berkembang dengan pesat, dan dengan hal itu penambahan penduduk jadi semakin meningkat. jika penambahan penduduk meningkat, maka pemukiman juga akan bertambah dengan bangunan Perumahan, gedung dan bangunan lainnya.

Penjelasan lebih lanjut di dalam peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 bahwa banjir di kota Pekanbaru umumnya terjadi akibat curah hujan yang tinggi, anak-anak sungai sebagai saluran primer belum tertata dengan baik, jaringan drainase yang belum tersambung seluruhnya serta belum lancarnya aliran pada saluran drainase yang ada. Genangan air ini disebabkan belum tuntasnya saluran drainase yang mengalirkan air limbah hujan ke anak sungai dan ke sungai.

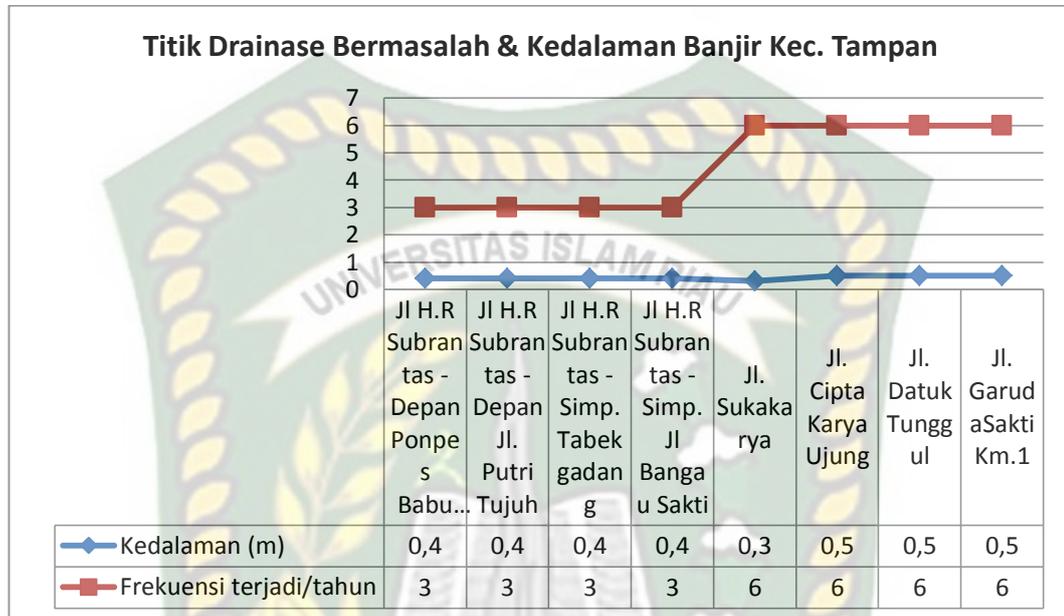
Selain itu, kemajuan kota Pekanbaru yang diikuti bertambahnya jumlah jalan, seharusnya pemerintah kota Pekanbaru menata dan membangun jaringan drainase agar dapat mengatasi banjir. Seiring pesatnya pembangunan jalan, maka juga dilaksanakan pembangunan jaringan drainase dan dihubungkan ke seluruh jaringan drainase, sehingga terhubung antara satu dengan yang lainnya hingga ke

sungai-sungai sebagai tempat akhir penampungan udara. Pemerintah kota Pekanbaru belum membuat aturan yang lebih lengkap tentang drainase khususnya besaran dan tinggi drainase mulai dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, jalan protokol, hingga jalan-jalan yang berada di perumahan warga atau gang-gang

Masalah lain yang terdapat pada pembangunan drainase yaitu lemahnya koordinasi dan konfigurasi komponen infrastruktur yang lain. sebagai akibatnya sering dijumpai tiang listrik pada tengah saluran drainase dan pipa air bersih (PDAM) memotong saluran pada penampang basahnya. sering pula penggalian saluran drainase secara tidak sengaja Mengganggu prasarana yg sudah lebih dahulu tertanam pada tanah sebab tidak adanya informasi yang relevan, arsip atau dokumen, atau perencanaan serta pengawasan di lapangan tidak terdapat instansi pengendali tata ruang.

Tabel I.1 : Data Titik Drainase Bermasalah dan Kedalaman Banjir Kec.

Tampan Tahun 2018



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Tabel I.2 : Data Kedalaman Banjir Tahun 2016-2018

No	Kecamatan	Kedalaman (cm)	Tahun
1.	Tampan	40	2016
2.	Tampan	20	2017
3.	Tampan	20	2018

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kota Pekanbaru memiliki 39 titik banjir, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota. Yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah jalan-jalan kota. Pada tahun 2019, Dinas PUPR sudah menyelesaikan 13 titik banjir. Pada tahun 2020, Dinas PUPR menargetkan untuk menyelesaikan 15 titik banjir dan target pada 2022 seluruh titik banjir di Kota Pekanbaru bisa diselesaikan. Dinas PUPR dan Dinas DLHK untuk mengatasi

masalah banjir bertugas dalam menangani saluran drainase, sungai dan anak sungai. Penyebab nya adalah penyumbatan sampah di dalam drainase tersebut.

Drainase mempunyai arti mengalirkan, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air dari tanah dalam kaitannya dengan sanitasi. (Dr. Ir. Suripin, M.Eng.2004).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14 Tahun 2010 standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan umum serta Penataan Ruang menjelaskan mengenai Drainase yaitu tersedianya sistem jaringan drainase skala tempat dan skala kota sebagai akibatnya tidak terjadi genangan (lebih berasal 30cm, selama duajam) serta tidak lebih dari dua kali dalam setahun.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/Prt/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menyebutkan bahwa dalam rangka mengalirkan kelebihan air yang berasal dari air hujan agar tidak terjadi genangan yang berlebihan pada suatu kawasan tertentu serta seiring dengan pertumbuhan kota dan perkembangan industri, perlu dibuat suatu sistem pengeringan dan pengaliran air yang baik. Kelebihan air sebagaimana dimaksud pada khususnya di wilayah perkotaan, perlu mendapatkan penanganan dan pengelolaan yang terencana dan terpadu melalui penyelenggaraan sistem drainase perkotaan. Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sumber Daya Air (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 82 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4858). Peraturan Menteri ini dimasukkan menjadi acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota, Badan perjuangan serta masyarakat dalam penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yg memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan mengurus pelayanan.
- b. menciptakan lingkungan permukiman yg sehat serta terbebas dari genangan.
- c. meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian udara.

Penyelenggaran Sistem Drainase Perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan kewenangannya. pemda dapat melakukan kerja sama antar daerah dalam penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 pasal 40 adalah sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinas, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar

satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

2. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
5. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
6. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan.

Dalam manajemen penataan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman, Dan Cipta Karya terlebih dahulu membuat kebijakan Master Plan, kemudian juga menuangkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dari RPJM bertolak untuk tahunan. Jadi, pada RPJM menetapkan untuk RPJM 5 tahunan (2017-2022) sesuai dengan visi misi Walikota, sama dengan masa dinas nya Walikota Pekanbaru lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

Berdasarkan perencanaan mengenai rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya bahwa mereka menentukan Rencana apa yang akan dilaksanakan untuk ke depannya. Dan inilah yang menjadi konsep atau acuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Permukiman dan Cipta Karya. Namun yang menjadi masalah saat ini sehingga terjadinya banjir di Kota Pekanbaru pada titik-titik tertentu adalah mengenai kebijakan Master Plan untuk keseluruhan Kota Pekanbaru belum ada.

Dalam pembangunan drainase, perencanaan dilakukan pada awal tahun kemudian mulai dilaksanakan pada pertengahan tahun dan penyelesaian pengerjaan di targetkan pada akhir tahun. Pembangunan drainase menghabiskan dana sekitar 800-900 juta/tahun. Pembangunan drainase ini sesuai dengan dana yang berasal dari APBD. Jika yang di targetkan tidak mencukupi dana pada tahun itu, akan dilanjutkan pembangunan pada tahun selanjutnya dan dari dana APBD tahun selanjutnya.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan memiliki tanggung jawab terhadap sampah. Bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Pekanbaru yang sehat, bersih serta sampah yang terus bertambah serta jenis dan ciri yang semakin bermacam-macam, sebagai akibatnya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan serta mencemari lingkungan maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara menyeluruh serta terpadu dari Hulu ke hilir.

Peraturan selanjutnya juga diatur dalam peraturan daerah kota pekanbaru nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah bahwa penyelenggara pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah dinas, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta dan kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Sejak tahun 2018 pengangkutan sampah di 10 kecamatan dari 12 kecamatan yg terdapat di kota pekanbaru diserahkan ke pihak ketiga. Zona 1 mencakup Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Dan Marpoyan Damai yang diserahkan kepada PT.Godang Tuo Jaya. Sedangkan zona 2, ada tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Sukajadi, Senapelan, Pekanbaru Kota, Limapuluh, Sail, Bukit Raya, Tenayan Raya yang diangkut oleh PT.Samhana Indah. Kedua perusahaan ini diberikan tugas untuk mampu memenuhi tujuan, yaitu sampah yg diangkut dari daerah masing-masing ke TPA muara fajar. Sisanya 2 kecamatan lagi di angkut sendiri oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui DLHK yaitu Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir. Kecamatan Tampan memiliki 10 armada truk pengangkut sampah, dan 29 orang petugas sapu jalanan.

Untuk saat ini masih banyak di berbagai daerah tidak disediakan tempat sampah, hanya seperti tempat-tempat umum seperti taman kota, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata. Sedangkan seperti area perumahan atau pemukiman warga masih sangat minim tempat pembuangan sampah sehingga hal ini menjadi pemicu masyarakat membuang sampah sembarangan karena alasan tidak disediakan tempat sampah. Bahkan tidak heran jika masyarakat membuang sampah ke dalam parit parit atau aliran drainase. Hal ini menjadi penyebab

drainase tersumbat oleh sampah, dan ketika hujan lebat dengan nasi tidak mampu menampung air karena dipenuhi oleh sampah. Drainase tidak mampu menampung air tinggal kelebihan kapasitas, air tersebut keluar dari drainase dan menyebabkan banjir. Untuk meminimalisir kebiasaan buruk masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, DLHK harus menyediakan tempat sampah di setiap daerah dan harus selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinas, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- 6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- 7) Dalam melakukan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR dan Dinas DLHK adalah melakukan rapat atau pertemuan secara langsung untuk membahas keadaan lingkungan. Koordinasi yang dilakukan tidak menentu, minimal sekali dalam sebulan. Dalam koordinasi ini, bidang yang menjadi koordinator adalah Bidang Sumber Daya Air (Dinas PUPR) dan Bidang Pengelolaan Sampah (Dinas DLHK). Setiap kepala bidang menjelaskan, mengawasi dan mengarahkan kepada setiap unit-unit yang dikoordinasikan. Tentu nya dalam koordinasi ini ada pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unit. Buku pedoman tersebut sebagai acuan dalam melaksanakan tugas. Setiap kepala atau pimpinan akan mengadakan rapat atau pertemuan dengan unit lain dan kemudian akan dijelaskan kepada bawahannya. Hasil dari koordinasi Dinas PUPR dan Dinas DLHK tersebut

adalah program dalam bentuk sosialisasi dan mengedukasi masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas PUPR dan Dinas DLHK mengerjakan tugas masing-masing dan menggunakan sarana dan prasarana Dinas masing-masing, jika terjadi banjir Dinas PUPR membersihkan saluran drainase yang tersumbat sampah, sedangkan Dinas DLHK bertanggung jawab atas pengangkutan sampah. Koordinasi dalam bentuk kerja sama ini rutin dilakukan setiap tahunnya.

Upaya yang dilakukan Dinas PUPR terhadap titik-titik banjir adalah sebagai berikut :

1. Updating data (evaluasi terhadap titik-titik banjir)
2. Menyusun Master Plan penanggulangan banjir
3. Program jangka panjang (mengekseskusi hasil dari master plan, yaitu bagaimana upaya terhadap titik-titik banjir dengan melakukan normalisasi sungai, normalisasi drainase, dan membangun sumur resapan.

Koodinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit- unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugasnya atasan adalah mengkoordinasikan setiap bawahannya, dan memberikan sanksi kepada bawahannya jika melanggar aturan. Dalam hal koordinasi vertikal, setiap kepala bidang akan mengatur dan mengarahkan bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Dan setiap kepala bidang bertanggung jawab kepada kepala dinas. Contoh bentuk koordinasi vertikal adalah kepala bidang

sumber daya air Dinas PUPR memberikan tugas kepada anggota bawahannya serta satuan tugas lapangan seperti tanggung jawab atas kebersihan drainase. Begitu juga dengan kepala bidang pengelolaan sampah Dinas DLHK, memberikan tugas serta mengawasi bawahannya terhadap tugas yang telah diberikan. Apabila bawahan melanggar aturan, maka akan diberikan teguran/sanksi.

Sedangkan bentuk koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat koordinasi (pegawai) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas interdisiplinary dan interrelated. Maksudnya adalah koordinasi horizontal bentuk kerjasama dengan badan atau instansi lain yg setingkat. Koordinasi dilakukan karena saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf. Seperti koordinasi yang dilakukan antara Dinas PUPR dan Dinas DLHK dalam menanggapi masalah di Kecamatan Tampan.

Selain berkoordinasi dengan Dinas DLHK, Dinas PUPR juga berkoordinasi dengan Kementrian PUPR, BWSS (badan wilayah sungai sumatera), Dinas PU Provinsi, Dinas Permukiman, Pemerintah Kabupaten/Kota. Dinas PU Provinsi, juga memiliki kewenangan seperti jalan HR.Soebrantas Panam merupakan tanggung jawab dinas tersebut, dan Dinas PUPR Kota Pekanbaru ikut serta dan bekerja sama dalam hal memperbaiki atau membangun drainase.

Masalah banjir pada ibukota Provinsi Riau masih sulit diatasi setiap tahunnya. Banjir pada Kota Pekanbaru tergolong banjir lokal & luapan air sungai. Faktor cuaca & dampak perubahan iklim yg memicu air hujan tidak menentu, tidak bisa disalahkan melainkan wajib disikapi pemerintah menggunakan perencanaan tata kota yg memadai

Pemerintah kota pekanbaru khususnya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dinilai belum optimal dalam penanganan banjir, sehingga diperlukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan dalam menangani banjir. Karena sampah juga menjadi penyebab utama terjadinya banjir dan sampah menjadi tanggung jawab dinas lingkungan hidup dan kebersihan sehingga harus ikut serta dalam menangani banjir.

Dalam koordinasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR dan Dinas DLHK masih memiliki kelemahan, karena itu banjir masih sulit di atasi setiap tahunnya. Kelemahan nya yaitu tidak ada kesepakatan yang begitu jelas, tidak ada program atau kegiatan yang dibuat bersama oleh kedua Dinas tersebut. Karena tidak ada kesepakatan yang jelas, sehingga juga tidak ada peraturan dan sanksi yang mengikat, hal ini menyebabkan masing-masing Dinas hanya sibuk pada tugas masing-masing dan kurang memperhatikan koordinasi. Seharusnya koordinasi saling melibatkan dalam pelaksanaan tugas yang dibuat bersama atau yang telah disepakati sebelumnya. Namun dalam koordinasi ini, belum terlihat koordinasi yang jelas dan belum ada regulasi yang mengatur, hanya berpedoman kepada Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah. Adapun kesepakatan yang dilakukan

hanya sebatas berbagi informasi yang dibahas dalam rapat koordinasi setiap bulannya.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ditemukan oleh penulis, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Menangani Masalah Banjir Di Kecamatan Tampan"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah peneliti paparkan dalam latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis koordinasi lintas sektoral dengan judul penelitian "Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Menangani Masalah Banjir Di Kecamatan Tampan" dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana koordinasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dengan dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam menangani masalah banjir di kecamatan tampan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan buruknya sistem drainase sehingga menyebabkan banjir?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi permasalahan banjir di kecamatan tampan?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis koordinasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dengan dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam menangani masalah banjir di Kecamatan Tampan.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan buruknya sistem drainase sehingga menyebabkan banjir.
- c. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi permasalahan banjir di Kecamatan Tampan.

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan kajian koordinasi di suatu instansi pemerintahan.
- b. Kegunaan praktis, yaitu diharapkan agar penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan informasi atau input bagi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dan dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam melaksanakan koordinasi.

- c. Kegunaan akademis, yaitu peneliti diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa bahan masukan atau bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Kata “Adminitrasi” yang kita kenal saat ini di Indonesia berasal dari kata *administrare*, yang berarti memberikan pelayanan.

Kata “administrasi” juga berasal dari kata “administration”. Kata to administer dapat berarti to manage (mengelola) dan to direct (menggerakkan). Ini berarti administrasi merupakan kegiatan mengelola atau menggerakkan.

Administrasi dalam pengertian luas dapat ditinjau dari sudut proses, fungsi, dan dari sudut kepranataan (institusi). Ditinjau dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses yang dimulai dari proses pemikiran, perencanaan, pengaturan, pengawas, sampai dengan proses yang mencapai tujuan. Ditinjau dari sudut fungsi atau tugas, administrasi berarti tindakan (aktivitas) yang mau atau tidak mau harus dilakukan dengan sadar oleh seseorang atau kelompok orang-orang yang berkedudukan sebagai administrator atau manajemen puncak suatu organisasi. Sedangkan administrasi dari sudut kepranataan, administrasi orang-orang yang melakukan aktifitas organisasi.

Menurut pendapat Herbert A. Simon (dalam Simon, 1959: 3) administrasi adalah aktivitas kelompok (orang) yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut nawawi (dalam syafiie, 2003:5) administrasi adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan sebagai proses usaha pengendalian proses usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pendapat Siagian dalam Silalahi (1989:9) bahwa Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya”

Sedangkan menurut Leonardo D. White administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil (dalam White, 1955: 1)

Administrasi menurut Prajudi Atmosudirjo (1982) administrasi merupakan fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern.

Sondang P. Siagian mengemukakan:

“Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” (Dikutip oleh Kencana, 2003:5)

Administrasi dalam arti luas menurut The Liang Gie yang di kutip Syafei dalam bukunya Ilmu Administrasi Publik (2003:4) mengatakan : administrasi adalah seluruh rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.”

Kemudian Gordon dalam Syafiie (2003:33) mengatakan Administrasi Negara bahwa Administrasi Negara adalah seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislative, eksekutif, serta peradilan.

Pasalong (2011:3) Administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsur-unsur. Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efisien, efektif dan rasional sedangkan dimensi unsur-unsur administrasi yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan.
- b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta.
- c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Tarmizi dan Hendry (2015:10) administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari batasan tentang administrasi ini terkandung beberapa makna yaitu :

- a. Administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedangkan akhirnya tidak ada.
- b. Administrasi mempunyai suatu unsur – unsur tertentu yaitu adanya dua orang manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak di capai, adanya tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas – tugas itu (waktu, tempat, peralatan, materi dll).
- c. Administrasi sebagai proses kerjasama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul bersama – sama dengan timbulnya peradaban manusia. Administrasi sebagai proses adalah suatu proses pelaksanaan

kegiatan – kegiatan tertentu yang di mulai sejak adanya dua orang yang bersepakat untuk bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu pula. Kapan proses itu berakhir tidak bisa diketahui karena bila kedua orang itu akan memutuskan untuk tidak bekerjasama lagi tidak ada yang mengetahuinya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu hubungan kerja sama dengan orang lain dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Konsep Organisasi

Pengertian organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam yakni organisasi sebagai alat dari pada manajemen dan organisasi sebagai fungsi organisasi. Organisasi sebagai alat berarti organisasi sebagai wadah, sebagai tempat manajemen, sehingga memberikan bentuk bagi manajemen yang memungkinkan manajemen dapat bergerak. Sedangkan organisasi sebagai fungsi adalah organisasi dalam arti dinamis (bergerak) yaitu organisasi yang memberi kemungkinan tempat manajemen dapat bergerak dalam batas-batas 16 tertentu. organisasi dalam arti dinamis berarti, bahwa organisasi itu bergerak mengadakan pembagian pekerjaan.

Pengertian organisasi mencakup dua segi, yaitu:

1. Organisasi sebagai wadah, lembaga atau kelompok fungsional ketika proses manajemen berlangsung.
2. Organisasi sebagai wadah pembentukan tingkah laku hubungan antarmanusia secara efektif sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dsan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugastugasnya serta memberikan kondisi lingkungan tertentu untuk pencapaian tujuan. Pengertian ini merujuk pada proses pengorganisasian, yaitu cara bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara para anggota sehingga tujuan dapat tercapai (Herujito, 2001: 110)

Robbins, 1994 dalam Sutrisno (2010: 141) organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. dikoordinasikan secara sadar mengandung pengertian manajemen. Kesatuan sosial berarti bahwa unit itu terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Pola interaksi yang diikuti orang di dalam sebuah organisasi tidak begitu saja timbul melainkan telah dipikirkan terlebih dahulu. Karena organisasi merupakan kesatuan sosial, pola interaksi para anggotanya harus diseimbangkan dan diselaraskan untuk tidak hanya sekadar meminimalkan kelebihan (*redundancy*), namun juga memastikan bahwa tugas- tugas yang kritis telah diselesaikan.

Menurut Stephan P. Robbins (1994:5) menyebutkan bahwa Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat di identifikasikan, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Organisasi menurut Baddudu Zain (1994:967), adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan latar belakang dasar ideologi yang sama.

Selanjutnya Hasibuan (2011:120) memberikan pengertian organisasi sebagai berikut:

”Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu”

Unsur-unsur organisasi menurut Wursanto (2003:54) terdiri dari:

1. Man (orang-orang), dalam kehidupan organisasi sering disebut dengan istilah pegawai atau personil.
2. Kerja sama, maksudnya adalah suatu perbuatan bantu membantu atau suatuperbuatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama
3. Tujuan bersama, merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai dan jugamenggambarkan apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola, kebijaksanaan, strategi, anggaran, dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
4. Peralatan, terdiri dari semua sarana yang berupa materi, mesin-mesin, uang, dan barang modal lainnya (tanah, gedung/ bangunan/kantor).
5. Lingkungan
6. Kekayaan alam, misalnya keadaan iklim, udara, air, cuaca, flora, dan fauna.
7. Kerangka atau konstruksi mental organisasi, berupa prinsip-prinsip organisasi.

Organisasi menurut Sondang P. Siagian (dalam Sofyandi, 2008:6) adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama secara fomal terikat dalam rangkaian pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan nama terdapat seorang/beberapa orang yang disebut bawahan.

Prinsip – prinsip organisasi menurut Siagian (2016:169) :

1. Kejelasan Tujuan
2. Kejelasan misi
3. Fungsionalitas
4. Pembagian tugas
5. Departementalisasi
6. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab
7. Kesatuan arah
8. Kesatuan komando
9. Kejelasan kebijaksanaan tentang pola pengambilan keputusan
10. Rentang kendali

Menurut Thoha (2003:223) menyatakan bahwa:

“Organisasi artinya adalah suatu kerangka hubungan yang berstruktur didalamnya berisi wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk menjaankan fungsi tertentu”

Menurut Handayani (1985:42) menyatakan:

“Organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan”

Dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan agar organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan maka seharusnya berpedoman kepada asas-asas (prinsip-prinsip) organisasi sebagai berikut:

1. Perumusan tujuan organisasi yang jelas;
2. Pembagian pekerjaan;
3. Kontinuitas dan fleksibilitas;
4. Delegasi wewenang dan tanggung jawab harus jelas dan seimbang;
5. Kesatuan arah;
6. Kesatuan komando;
7. Tingkat-Tingkat pekerjaan dan
8. Prinsip Koordinasi

Berdasarkan pernyataan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah atau tempat sumber daya manusia saling bekerja sama yang memiliki tujuan yang telah ditetapkan.

3. Konsep Manajemen

Manajemen sebagai ilmu pengetahuan, manajemen juga bersifat meluas dan mempergunakan kerangka ilmu pengetahuan yang sistematis, mencakup kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang cenderung benar dalam semua situasi manajerial. Ilmu pengetahuan manajemen dapat diterapkan dalam semua organisasi manusia, perusahaan, pemerintah, pendidikan, dan lain-lain.

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang di kemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah :

G.R. Terry mendefinisikan manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.

Ridwan mendefinisikan manajemen adalah proses merencanakan mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan untuk menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Kusnawan, 2009: 7).

Menurut T.Hani Handoko (2000:10) Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, kepemimpinan dan pengawasan.”

Malayu S.P. Hasibuan (2000:2) mengungkapkan bahwa Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan.

Menurut James A.F. Stoner (2006) menjelaskan Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut The Liang Gie (1982) Manajemen adalah sebuah unsur yang merupakan rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan dan

mengarahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan organisasi yang bersangkutan benar-benar tercapai.

Menurut George R. Terry (dalam Hasibuan, 2014:2), menyatakan bahwa :

“Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya”.

Menurut Richard L. Daff (2002:8) Manajemen adalah pengambilan sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya organisasi.

Menurut Yohanes Yahya (2006:2) Manajemen adalah sebagai bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapakan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan lebih bermanfaat dan Manajemen bukan hanya sebagai ilmu atau seni, tetapi merupakan kombinasi dari keduanya. Manajemen sebagai salah satu proses, maksudnya manajemen yang dilihat dari proses kerja manajemen pada sebuah organisasi. Proses kerja ini terlihat dari fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan dalam proses kerja. Fungsi manajemen ini sering disingkat dengan POAC yakni:

1. Planning (Perencanaan) yaitu kegiatan yang diawali sebuah rencana yang jelas atau perencanaan yang baik.
2. Organizing (Pengaturan) yaitu setelah rencana dibuat, perlu adanya pengaturan dan pembagian kerja yang dilakukan dengan jelas dan bijaksana.
3. Actuating (Pengarahan) yaitu orang yang melaksanakan pekerjaan diberikan petunjuk atau arahan dan motivasi agar mereka bekerja sesuai dengan rencana
4. Controlling (Pengendalian) yaitu untuk memastikan pekerjaan berjalan dengan benar, tepat dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Siagian dalam Silalahi (1989:137) mengatakan pengertian manajemen sebagai berikut:

“Manajemen dapat didefinisikan sebagai sebuah seni atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain”.

Hasibuan (2007:1) mengatakan pengertian manajemen ialah :

“ilmu mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber – sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan”.

Dari beberapa definisi diatas, adapun dasar-dasar manajemen sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama di antara sekelompok orang dalam ikatan formal.
2. Adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang akan dicapai.
3. Adanya pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab yang teratur.
4. Adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik.
5. Adanya sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan.
6. Adanya human organization.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu ilmu atau seni untuk mengatur, mengelola, dan merencanakan visi misi suatu organisasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset penting dan berperan sebagai faktor penggerak utama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan atau aktifitas instansi, sehingga harus dikelola dengan baik melalui manajemen sumber daya manusia. Menurut para ahli pengertian manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

Menurut Handoko (2011:3) manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu maupun organisasi.

Menurut Umar dalam Sunyoto (2013:4) mengatakan bahwa :

“manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan atas pengadaan , pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu”

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaanbakat manusia secara efektifdanefisiengunamencapai tujuan-tujuan organisasional. Tidak peduli apakah perusahaan tersebut merupakan sebuah perusahaan besar yang memiliki 10.000 karyawan atau organisasi nirlaba kecil yang memiliki 10 karyawan, tetap saja karyawan-karyawan tersebut harus dibayar, yang berarti dibutuhkan sebuah sistem kompensasi yang baik dan sah. (Faustino, 2003:10).

MSDM adalah pengembangna dan pemanfaatan personil (pegawai) bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional. Manajemen sumber daya manusia bisa didefinisikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi,

pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. (Umar, 2001: 331)

Kaswan (2012: 6) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen yang meliputi antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan lain-lain. MSDM menangani SDM, yaitu orang yang siap, bersedia dan mampu memberi kontribusi terhadap tujuan stakeholders. MSDM memperhatikan kesejahteraan manusia dalam organisasi agar dapat bekerja sama secara efektif dan berkontribusi terhadap kesuksesan organisasi. MSDM merupakan sistem yang mempunyai beberapa fungsi, kebijakan, aktivitas, atau praktik diantaranya recruitment, selection, development, compensation, retention, evaluation, promotion, dan lain-lain.

Sedangkan Edy Sutrisno (2012: 6) lebih spesifik mengatakan bahwa :

“MSDM adalah kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan SDM untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi.”

Edy Sutrisno (2012: 7-8) mengemukakan tujuan dari manajemen sumber daya manusia, sebagai berikut:

1. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal.
2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya.
3. Membantu dalam pengembangan keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM.
4. Memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini mencapai tujuan.
5. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya.
6. Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi.

7. Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen SDM.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah usaha yang dilakukan untuk mengelola, mengarahkan dan mengawasi sumber daya manusia yang ada dalam organisasi agar melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

5. Konsep Koordinasi

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, komunikasi yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh pimpinan maka setiap individu bawahan akan mengerjakan sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur;

Koordinasi menurut Handoko (2003:195) dianggap sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Handyaningrat (1985:88) berpendapat bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut Ismail Solihin (2009: 91), karakteristik pertama dari organisasi adalah adanya koordinasi upaya dari sumber daya manusia yang terlibat dalam organisasi. Penggabungan yang terkoordinasi dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan upaya perseorangan.

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2009:85) berpendapat bahwa : “koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”.

Menurut Yohanes Yahya (2006:95), koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2009:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Manullang (2008:72) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Richard L. Daft (2011:30) koordinasi mengacu pada kualitas kolaborasi di antara departemen. Menurut Manullang (2008:72-73), koordinasi

dapat dilakukan dengan berbagai cara. Empat cara utama dalam usaha memelihara koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan resmi antara unsur-unsur atau unit yang harus dikoordinasikan. Dalam pertemuan seperti ini, dibahas dan diadakan pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan berjalan seiring dan bergandengan dalam mencapai suatu tujuan.
2. Mengangkat seseorang, suatu tim atau panitia koordinator yang khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi, seperti memberi penjelasan atau bimbingan kepada unit-unit yang dikoordinasikan.
3. Membuat buku pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unit. Buku pedoman seperti itu diberikan kepada setiap unit untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
4. Pimpinan atau atasan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi, dan pengarahan. Melakukan kegiatan koordinasi dengan berbagai cara seperti tersebut di atas adalah amat perlu sebab adanya kegiatan koordinasi dapat menghindarkan terjadi konflik mengurangi duplikasi tugas, meniadakan pengangguran, melenyapkan kepentingan unit sendiri dan memperkukuh kerja sama. Dengan setiap koordinasi diharapkan akan tercipta suasana kerja sama, kesatuan tindakan dan kesatuan tujuan akhir.

Handyaningrat (1985: 88), Koordinasi adalah usaha penyesuaian dari bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan dari bagian-bagian itu dapat selesai tepat pada waktunya, sehingga masing-masing anggota dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar diperoleh hasil secara keseluruhan. Koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator:

1. Komunikasi
 - a. Informasi
 - b. Alur informasi
 - c. Pemanfaatan teknologi informasi
2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi
 - a. Tingkat pengetahuan pelaksana
 - b. Tingkat keselarasan
3. Kompetensi Partisipan
 - a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
 - b. Ada tidaknya ahli di bidang pembangunan
4. Kesempatan, Kesepakatan, dan Insentif Koordinasi

- a. Kesepakatan
 - b. Pelaksanaan kegiatan
 - c. Sanksi
 - d. Insentif bagi pelaksana koordinasi
5. Kontinuitas Perencanaan
- a. Umpan balik
 - b. Perubahan terhadap hasil kesepakatan

A. Kebutuhan Akan Koordinasi

Kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan organisasi berbeda dalam kebutuhan Integrasi. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Bila tugas-tugas tersebut memerlukan aliran informasi antar satuan, derajat koordinasi yang tinggi adalah paling baik. Derajat koordinasi yang tinggi ini sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak diperkirakan, faktor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan tinggi. Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi.

Ada tiga macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi menurut Yohanes Yahya (2006 :95) yaitu:

1. Saling ketergantungan yang menyatu
2. Saling ketergantungan yang berurutan
3. Saling ketergantungan timbal balik

B. Masalah-Masalah Pencapaian Koordinasi yang Efektif

Peningkatan spesialisasi akan menaikkan kebutuhan akan koordinasi. Tetapi semakin besar derajat spesialisasi, semakin sulit bagi manajer/pimpinan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan khusus dari satuan-satuan yang berbeda.

Menurut Yohanes Yahya (2006:95), ada empat tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas-tugas organisasi secara efektif sebagai berikut:

1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu
2. Perbedaan dalam orientasi waktu
3. Perbedaan dalam orientasi antar pribadi
4. Perbedaan dalam formalitas struktur

C. Tipe Koordinasi Umumnya

Organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik.

Menurut Hasibuan (2009:86-87) Tipe koordinasi dibagi menjadi dua bagian besar :

1. Koordinasi vertikal
2. Koordinasi horizontal.

Kedua tipe ini biasanya ada dalam sebuah organisasi. Makna kedua tipe koordinasi ini dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini:

- a. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugasnya atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada pegawai yang sulit diatur.
- b. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat koordinasi (pegawai) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas interdisiplinary dan interrelated.

Interdisipliner adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara

unit yang satu dengan unit lain secara internal maupun ekstra pada unit-unit yang sama tugasnya.

Interrelated adalah koordinasi antar badan (instansi) unit-unit principle fungsinya berbeda, tetapi instansi satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat/setara

D. Tujuan Koordinasi

Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa manfaat yang didapatkan. Jelas manfaat koordinasi sangat menentukan terselenggaranya usaha yang telah diprogramkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tetapi apabila koordinasi tidak melaksanakan atas departemen dan pembagian kerja akan menimbulkan organisasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kesatuan arah. Koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni :

1. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
2. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi.
3. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
4. Supaya semua tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Hasibuan (2009:86).

E. Prinsip-Prinsip Koordinasi

Prinsip koordinasi menurut Follet (1997:76) terdapat 4 prinsip, yaitu:

1. Early Stage, Berdasarkan prinsip tahap awal, proses koordinasi harus dilakukan pada tahap awal proses manajerial. Koordinasi harus dimulai sejak proses perencanaan sehingga dapat menghasilkan perencanaan dan implementasi yang baik. Jika koordinasi selalu dilakukan di awal maka semua fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling dapat terlaksana dengan baik. Selain itu dengan proses

koordinasi yang baik, tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih mudah dan cepat.

2. Continuity, Berdasarkan prinsip kesinambungan, koordinasi merupakan sebuah proses yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Proses koordinasi dimulai sejak membentuk organisasi sampai organisasi tersebut berjalan. Koordinasi selalu dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap proses planning, organizing, actuating, dan controlling.
3. Direct contact, Berdasarkan prinsip kontak langsung, proses koordinasi dapat berjalan dengan baik karena adanya komunikasi langsung antara anggota organisasi. Seluruh manajer harus mampu berkomunikasi langsung dengan baik dengan bawahannya sehingga tercipta hubungan yang baik. Kontak langsung ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman, salah penafsiran, dan perselisihan antara manajer dan anggota organisasi lainnya. Dengan demikian manajer dapat mengkoordinasi berbagai aktivitas anggotanya secara efektif dan efisien.
4. Reciprocal relation, Prinsip timbal balik menyatakan bahwa semua faktor dalam organisasi saling bergantung dan berhubungan. Setiap keputusan dan tindakan seseorang di dalam organisasi akan mempengaruhi situasi keseluruhan organisasi. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan atau melakukan tindakan harus mempertimbangkan efek yang muncul pada orang lain atau departemen lain apabila keputusan atau tindakan tersebut diterapkan. Diterapkannya prinsip ini diharapkan manajer atau anggota lainnya mengambil keputusan atau tindakan sepihak, sehingga koordinasi dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Abdulrachman (1979:8), prinsip-prinsip koordinasi adalah:

1. Prinsip efisiensi
2. Prinsip kesatuan arah dan tujuan (konvergensi)
3. Prinsip pervasivitas, memasuki segenap kegiatan management dan pelaksanaan
4. Prinsip ketepatan penggunaan alat koordinasi
4. Prinsip dari koordinasi yang strategis

Sugandha (1991:35), prinsip-prinsip koordinasi adalah:

1. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.
2. Adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya.
3. Adanya ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan.
4. Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerja sama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing.

5. Adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerja sama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama.
6. Adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerja sama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak.
7. Adanya saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling membantu.

Masalah Koordinasi Sekalipun pada umumnya telah disadari pentingnya koordinasi dalam proses administrasi/manajemen pemerintahan, tetapi kenyataannya dalam praktek tidak jarang ditemukan berbagai masalah yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan koordinasi yang diperlukan, sehingga pencapaian sasaran/tujuan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Wursanto (2003:254) mengatakan bahwa koordinasi dapat dijalankan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Dengan memanfaatkan saluran/media komunikasi, misalnya:
 - a. Media elektronik, misalnya interpon, telepon, telek, undangan, faksimil, adan lain sebagainya, apabila jaraknya saling berjauhan.
 - b. Media cetak/tertulis, misalnya surat edara, memo atau nota dalam, buku pedoman organisasi, buku pedoman tatakerja, buku pedoman peraturan.
 - c. Media tatap muka, yaitu degan mengadakan pertemuan-pertemuan, baik pertemuan formal maupun pertemuan informal. Pertemuan formal misalnya dengan mengadakan rapat kerja, rapat pimpinan, rapat dinas, rapat koordinasi, konferensi. Sedang rapat informal, misalnya pertemuan pada waktu istirahat atau makan bersama, sedang naik kendaraan bersama baik pada waktu mau berangkat maupun pada waktu pulang, silaturahmi, dsb

Handayani (1989:129) berbagai faktor yang dapat menghambat tercapainya koordinasi itu adalah sebagai berikut:

1. Hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural) Dalam koordinasi vertikal (struktural) sering terjadi hambatan-hambatan

disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap tiap satuan kerja (unit kerja) kurang jelas. Disamping itu adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan kadang-kadang timbul keragu-raguan diantara mereka. Sebenarnya hambatan-hambatan yang demikian itu tidak perlu karena antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan ada hubungan komando dalam susunan organisasi yang bersifat hierarkis.

2. Hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional Hambatan-hambatan yang timbul pada koordinasi fungsional baik yang horizontal maupun diagonal disebabkan karena antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan tidak terdapat hubungan hierarkis (garis komando). Sedangkan hubungan keduanya terjadi karena adanya kaitan bahkan interdependensi atas fungsi masing-masing.

Adapun hal-hal yang biasanya menjadi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara lain:

1. Para pejabat sering kurang menyadari bahwa tugas yang dilaksanakannya hanyalah merupakan sebagian saja dari keseluruhan tugas dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.
2. Para pejabat sering memandang tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling penting dibandingkan dengan tugas-tugas lain.
3. Adanya pembagian kerja atau spesialisasi yang berlebihan dalam organisasi.
4. Kurang jelasnya rumusan tugas atau fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat atau satuan organisasi.
5. Adanya prosedur dan tata kerja yang kurang jelas dan berbelitbelit dan tidak diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan dalam usaha kerjasama.
6. Kurangnya kemampuan dari pimpinan untuk menjalankan koordinasi yang disebabkan oleh kurangnya kecakapan, wewenang dan kewibawaan.
7. Tidak atau kurangnya forum komunikasi diantara para pejabat yang bersangkutan yang dapat dilakukan dengan saling tukar menukar informasi dan diciptakan adanya saling pengertian guna kelancaran pelaksanaan kerjasama.

6. Konsep Drainase

Drainase mempunyai arti mengalirkan, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu

kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air dari tanah dalam kaitannya dengan sanitasi. (Dr. Ir. Suripin, M.Eng.2004).

Sedangkan pengertian tentang drainase kota pada dasarnya telah diatur dalam SK menteri PU No. 233 tahun 1987. Menurut SK tersebut, yang dimaksud drainase perkotaan adalah jaringan pembuangan air yang berfungsi mengeringkan bagian-bagian wilayah kota dan daerah urban dari genangan air, baik dari hujan lokal maupun luapan sungai melintas di dalam kota.

Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas:

1. Sistem teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya.
2. Sistem non teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud merupakan dukungan terhadap sistem teknis drainase perkotaan terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi, sosial ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan permukiman.
3. Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan.

Jenis drainase yang ada sangat beragam, sehingga untuk memudahkan dalam pemahaman jenis-jenis drainase dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu :

Jenis drainase ditinjau dari cara terbentuknya.

1. Drainase alamiah, yaitu saluran drainase yang terbentuk sebagai akibat adanya gerusan air yang mengikuti pola kontur tanah. Drainase ini biasanya terbentuk pada daerah yang cukup miring. Sehingga secara alamiah air akan mengalir dengan sendirinya dan masuk ke sungai-sungai yang ada dibawahnya. Pada kondisi tanah tertentu sebagian air akan meresap kedalam tanah (infiltasi) dan dalam proses selanjutnya air akan mengalir sehingga

menjadi aliran menuju ke sungai. Atau air tersebut akan masuk terus ke dalam tanah (perkolasi) hingga bercampur dengan air tanah dan mengalir sebagai aliran air tanah menuju ke sungai-sungai.

2. Drainase buatan, adalah suatu sistem drainase yang dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu serta merupakan hasil rekayasa yang berdasarkan hitungan-hitungan tertentu pula. Sistem drainase ini merupakan salah satu rekayasa dalam penyempurnaan atau mengisi kekurangan sistem drainase alamiah yang telah ada.

Jenis drainase berdasarkan sistem pengalirannya.

1. Drainase dengan sistem jaringan, adalah suatu sistem pengeringan atau pengaliran air pada suatu kawasan tertentu yang dilakukan dengan jalan mengalirkan air melalui suatu sistem tata saluran dengan berbagai bangunan-bangunan pelengkap.
2. Drainase dengan sistem resapan, adalah suatu sistem pengeringan atau pengaliran air yang dilakukan dengan cara meresapkan air ke dalam tanah. Cara peresapan ini dapat dilakukan secara langsung terhadap genangan air dipermukaan tanah ke dalam tanah atau melalui sumur resapan/saluran resapan. Sistem ini biasanya dipergunakan dalam usaha konservasi air.

Jenis drainase ditinjau berdasarkan tujuan pembuatan drainase.

1. Drainase perkotaan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 239 Tahun 1987 yang dimaksud dengan drainase perkotaan adalah jaringan pembuangan air yang berfungsi mengeringkan bagian-bagian wilayah kota dan daerah dari genangan air, baik dari hujan lokal maupun luapan sungai yang melintas di dalam kota.
2. Sedangkan pengertian lain dari drainase perkotaan adalah suatu sistem pengeringan atau pengaliran dari wilayah perkotaan ke sungai yang ada atau melintasi wilayah perkotaan sehingga wilayah perkotaan itu sendiri tidak tergenangi air.

Jenis drainase berdasarkan tata letaknya.

1. Drainase permukaan tanah, yaitu sistem drainase yang salurannya berada di atas permukaan tanah dimana pengaliran terjadi karena adanya beda tinggi permukaan saluran (slope).
2. Drainase bawah permukaan, yaitu sistem drainase yang dialirkan di bawah tanah (ditanam) biasanya disebabkan karena faktor artistik atau faktor kondisi lingkungan dimana dalam areal drainase tersebut tidak memungkinkan untuk mengalirkan air di atas permukaan tanah seperti pada lapangan olah raga, lapangan terbang, taman kota dan lain sebagainya.

Jenis drainase berdasarkan konstruksinya.

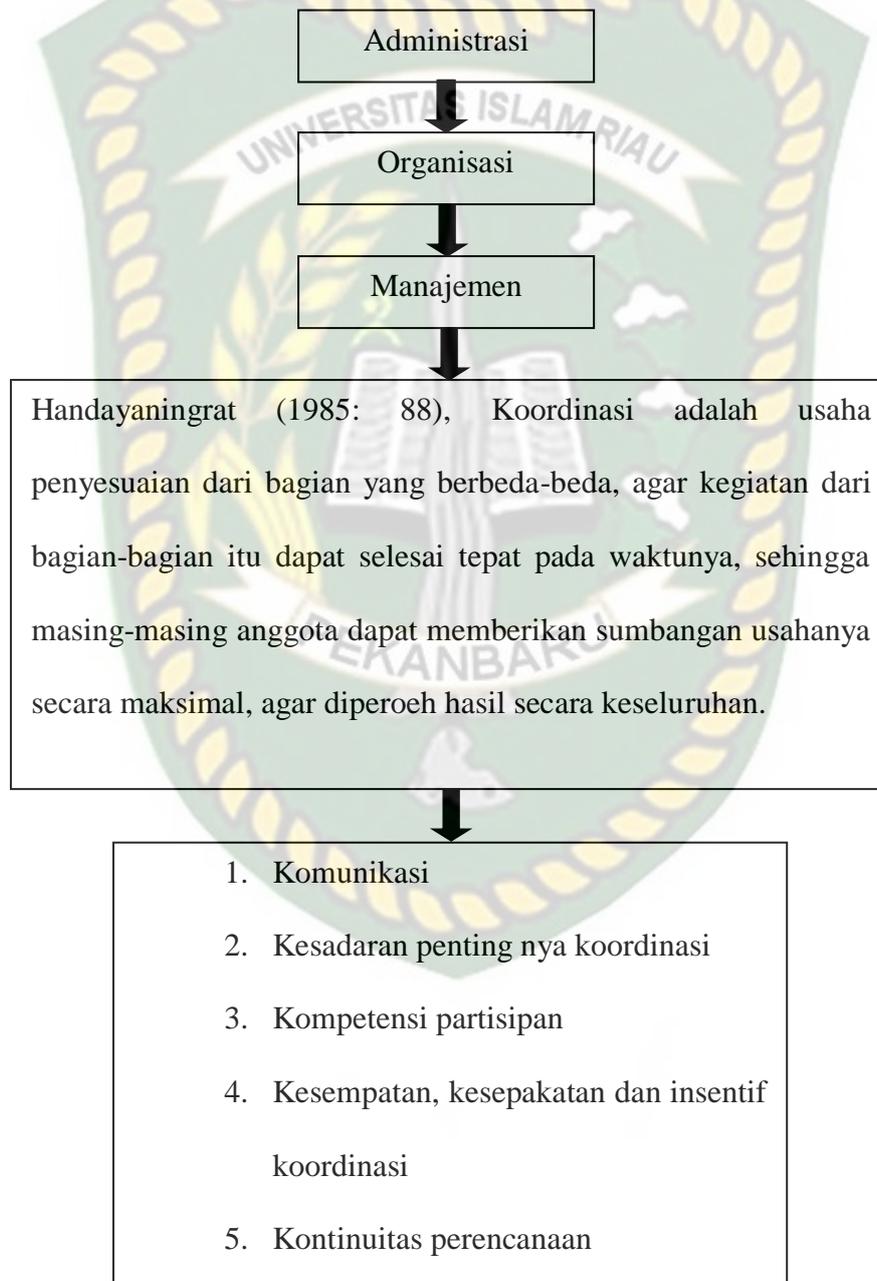
1. Drainase terbuka, adalah sistem saluran yang permukaan airnya terpengaruh dengan udara luar. Drainase saluran terbuka biasanya mempunyai luasan yang cukup dan digunakan untuk mengalirkan air hujan atau air limbah yang tidak membahayakan kesehatan lingkungan dan tidak mengganggu keindahan.
2. Drainase tertutup, adalah sistem saluran yang permukaan airnya tidak terpengaruh dengan udara luar. Saluran ini biasanya digunakan untuk mengalirkan air limbah atau air kotor yang mengganggu kesehatan lingkungan dan mengganggu keindahan.

Berdasarkan fungsi layanannya, maka drainase perkotaan dapat terbagi ke dalam beberapa jenis yaitu :

1. Sistem drainase lokal, adalah saluran awal yang melayani suatu kawasan kota tertentu seperti daerah permukiman, areal pasar, perkantoran, area industri dan komersial. Sistem ini biasanya melayani area kurang dari 10 ha.
2. Sistem drainase utama, yang termasuk dalam sistem ini adalah saluran drainase primer, sekunder, tersier beserta bangunan pelengkap yang melayani kepentingan sebagian besar masyarakat
 - a. Drainase Tersier : Drainase skala kecil yang berada di pemukiman perumahan.
 - b. Drainase Sekunder : Drainase skala sedang yg ada di jalan-jalan protokol atau jalan-jalan di kota.
 - c. Drainase Primer : Sungai merupakan drainase skala terbesar tempat menampung seluruh saluran drainase, seperti contoh sungai sail.

B. Kerangka Pikir

Gambar II. 1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Proses Komunikasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Dalam Menangani Masalah Banjir Di Kecamatan Tampan



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2020

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari dan menghilangkan kesalahpahaman mengenai beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional. Untuk lebih jelasnya, peneliti memberi batasan berupa konsep operasional.

Defenisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendeskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut).

1. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat di identifikasikan, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.
3. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan,

pengintegrasian dan lain sebagainya termasuk memperhatikan hubungan kerja, kesehatan, keamanan dan masalah keadilan agar efektif dan efisien dalam penggunaan kemampuan manusia agar dapat mencapai tujuan perusahaan.

5. Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur;
6. Drainase mempunyai arti mengalirkan, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, definisi drainase sebagai serangkaian bangunan yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.

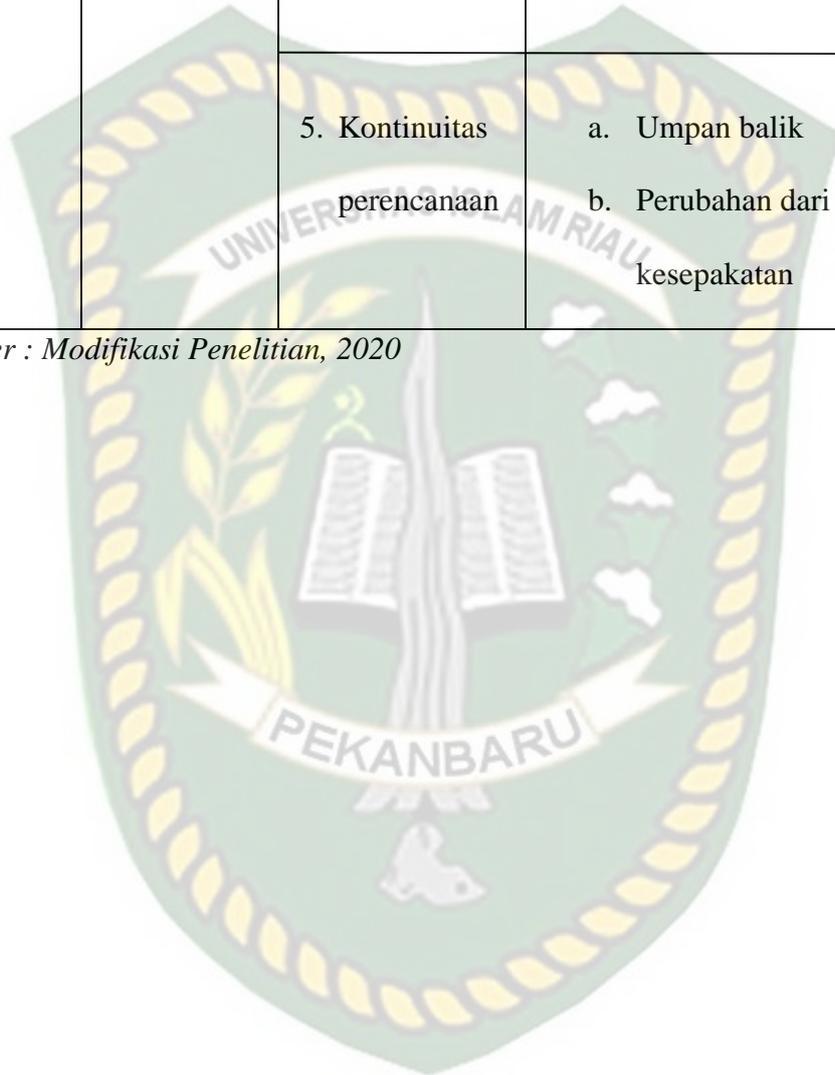
D. Operasionalisasi Variabel

TABEL II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Proses Komunikasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Dalam Menangani Masalah Banjir Di Kecamatan Tampan

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Handayaniingrat (1985: 88) Koordinasi adalah usaha penyesuaian dari bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan dari bagian-bagian itu dapat selesai tepat pada waktunya, sehingga masing-masing anggota dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar diperoleh hasil	Koordinasi	1. Komunikasi	a. Informasi b. Alur informasi c. Pemanfaatan teknologi informasi	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak terlaksana
		2. Kesadaran penting nya koordinasi	a. Tingkat pengetahuan pelaksana b. Tingkat keselarasan	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak terlaksana
		3. Kompetensi partisipan	a. Adanya pejabat yang berwenang b. Adanya ahli di bidang pembangunan	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak terlaksana
		4. Kesempatan, kesepakatan	a. Kesepakatan b. Pelaksanaan	Terlaksana Cukup terlaksana

secara keseluruhan.		dan insentif Koordinasi	kegiatan c. Sanksi d. Insentif	Tidak terlaksana
		5. Kontinuitas perencanaan	a. Umpan balik b. Perubahan dari hasil kesepakatan	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak terlaksana

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2020



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian ini adalah tipe kualitatif, dengan analisis deskriptif. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta menganalisis bagaimana Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Menangani Masalah Banjir Di Kecamatan Tampan karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisis dan informasi yang detail terhadap objek penelitian, sehingga akan ditemukan kejadian-kejadian relatif dan diperoleh gambaran yang sangat jelas dari hasil analisis.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, penulis mengambil penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Adapun memilih lokasi penelitian ini dikarenakan perlunya koordinasi dan kerja sama antar kedua Dinas tersebut untuk mengatasi permasalahan banjir yang terus terjadi setiap tahun nya di Kota Pekanbaru terutama di Kecamatan Tampan.

C. Key informan

Informan adalah orang yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Menurut pendapat dari Hendarsono dalam Suyanto (2005:171-172), informan penelitian meliputi tiga macam yaitu:

1. Informan kunci (key informan), yaitu orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama, yaitu orang yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan, yaitu orang yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Berdasarkan uraian di atas, maka informan ditentukan dengan teknik purposive yaitu penentuan informan tidak didasarkan pedoman atau berdasarkan perwakilan populasi, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan menemukan informan kunci yang kemudian akan dilanjutkan pada informan lainnya dengan tujuan mengembangkan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, yang menjadi key & informan adalah :

1. Key informan :
 - a. Kepala Dinas PUPR
 - b. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah (DLHK)
2. Informan :
 - a. Kepala Seksi Bidang Sumber Daya Air

b. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah

D. Teknik Penarikan Informan

Teknik penarikan informan dalam penelitian ini adalah teknik "snowball sampling", yaitu teknik dengan menetapkan beberapa orang sebagai informan, dan akan bertambah jumlah informan nya jika data atau kebutuhan penelitian dirasa masih kurang, untuk menambah kebutuhan penelitian, maka penulis mencari beberapa orang informan untuk melengkapi jawaban yang dibutuhkan.

E. Jenis Dan Sumber Data

Data merupakan bagian terpenting dalam penelitian karena ini dari penelitian adalah pencarian data yang nantinya akan terinterpretasikan dan analisis. Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data primer adalah data langsung yang berasal dari narasumber atau informan. Istilah yang sering disebut adalah responden. Dalam penelitian ini yang termasuk ke dalam data primer adalah data yang di dapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data resmi yang berasal dari kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang & Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini yang termasuk data sekunder adalah

informasi mengenai sejarah, struktur organisasi, visi, misi dan tugas serta fungsi dinas.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data, yaitu agar data yang didapatkan jauh lebih lengkap dan akurat. Teknik tersebut adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi secara langsung, yaitu seputar tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model wawancara terstruktur, yaitu sebelum melakukan wawancara peneliti telah mempersiapkan pertanyaan secara sistematis yang akan diajukan, didukung dengan instrumen-instrumen lain seperti alat perekam, kamera dan lainnya.

2. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan (Semiawan, 2010). Teknik observasi digunakan untuk memahami pola, norma, dan makna perilaku dari informan yang diteliti. Bentuk observasi dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa pedoman observasi, peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan yang terjadi di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Contoh data dokumentasi dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari Dinas PUPR dan Dinas DLHK.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2015, hlm. 246). Analisis data kualitatif merupakan upaya yang terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2015, hlm. 247)

1. Reduksi Data

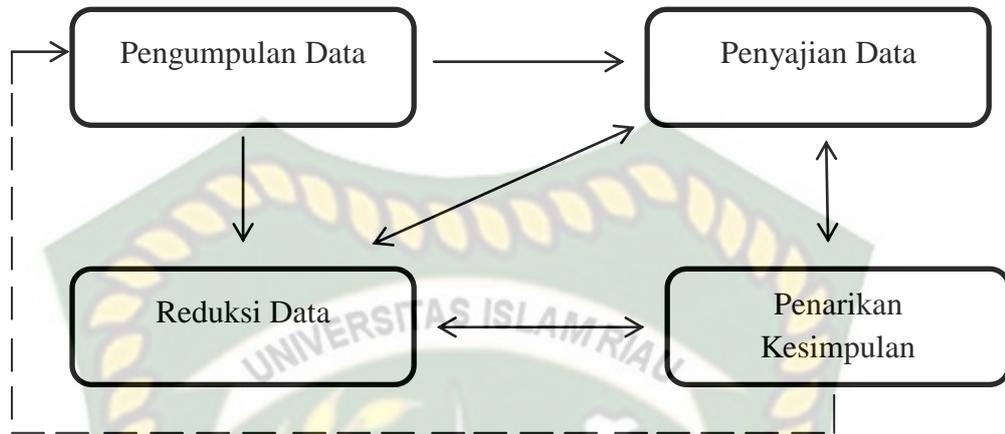
Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan untuk mereduksi dan merangkum hasil-hasil penelitian dengan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul sehingga data yang direduksi memberikan gambaran lebih jelas.

2. Sajian Data

Display data adalah data-data dari hasil penelitian yang sudah tersusun secara terperinci untuk memberikan gambaran penelitian secara utuh. Data yang terkumpul secara terperinci dan menyeluruh selanjutnya dicari pola hubungannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data selanjutnya disusun dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan data dimulai dengan penataan data lapangan (data mentah), kemudian di reduksi dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian ini terdiri dari 6 bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN & KERANGKA PIKIR

Dalam bab ini menguraikan tentang studi kepustakaan, kerangka pikir, konsep operasional, dan operasionalisasi variabel.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan mengenai tipe penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, key informan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : DESKRIPTIF LOKASI PENELITIAN

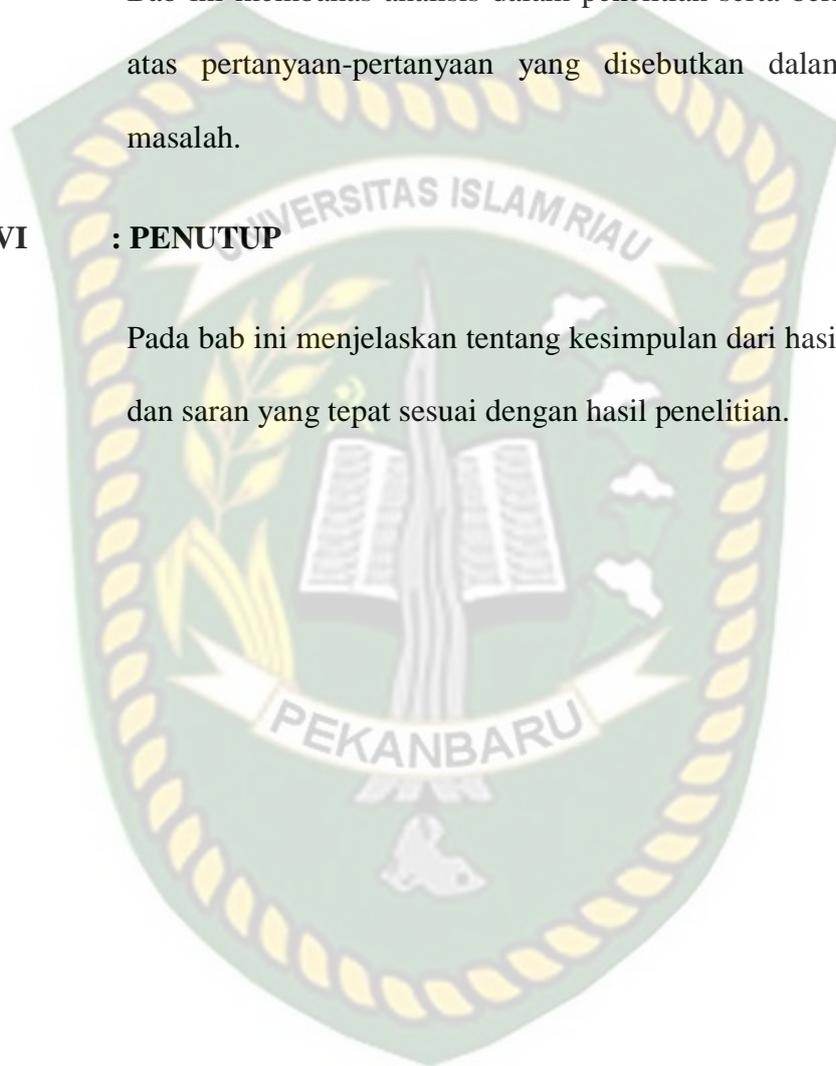
Bab ini menjelaskan sejarah ringkas lembaga tempat penelitian, struktur organisasi, fungsi dan tugas organisasi, sumber daya organisasi dan informasi lainnya yang berkaitan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas analisis dalam penelitian serta berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang tepat sesuai dengan hasil penelitian.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru resmi sebagai ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25. Secara geografis kota Pekanbaru terletak di posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dipisah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 °C hingga 35,6 °C, dan suhu minimal antara 20,2 °C hingga 23,0 °C.

Penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2019 bersumber dari hasil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 954.373 jiwa, sedangkan berdasarkan hasil proyeksi penduduk oleh Badan Statistik adalah 1.149.359 jiwa. Persentase penduduk jika di rinci menurut kecamatan, terlihat bahwa Kecamatan Tampan, Tenayan Raya, dan Marpoyan Damai adalah wilayah dengan jumlah penduduk paling banyak. Jika dibagi dengan luas wilayah, terlihat bahwa Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota dan Lima Puluh memiliki kepadatan penduduk paling besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

B. Profil Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.NO.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ± 199.792 km². Kecamatan Tampan merupakan daerah bertopografi datar dengan letak geografis antara 00 42' - 0 0 50' Lintang Utara dan Antara 1010 35' - 1010 43' Bujur Timur.

Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 131 Rukun Warga (RW) dan 574 Rukun Tetangga (RT). Luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 59,81 km² dengan jumlah Kelurahan kelurahan sebanyak 9 Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Sidomulyo Barat
3. Kelurahan Tuah Karya
4. Kelurahan Tuah Madani
5. Kelurahan Tobek Gadang
6. Kelurahan Bina Widya
7. Kelurahan Air Putih
8. Kelurahan Sialang Munggu
9. Kelurahan Delima.

Batas-batas wilayah Kecamatan Tampan adalah:

- Sebelah timur: berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
- Sebelah barat: berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- Sebelah utara: berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekakii
- Sebelah selatan: berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Jumlah penduduk Kecamatan Tampan mencapai 307.947 jiwa pada tahun 2018. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 6,96 persen dari tahun 2017. Kepadatan penduduknya mencapai 5.148 jiwa/km².

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tampan, 2018

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Simpang Baru	17 336	16 298	33 634
2 Sidomulyo Barat	25 543	24 058	49 601
3 Tuah Karya	24 521	23 347	47 868
4 Delima	15 006	14 795	29 801
5 Tuah Madani	10 781	9 243	20 024
6 Sialang Munggu	24 188	24 523	48 711
7 Tobek Godang	16 831	16 031	32 862
8 Bina Widya	11 092	9 785	20 877
9 Air Putih	12 897	11 672	24 569
Jumlah	158 195	149 752	307 947

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2018

C. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang adalah unsur pelaksana dan penunjang dibidang Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pemerintah dan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah diserahkan (desentralisasi) dan dilimpahkan

(dekonsentrasi) kepada Daerah Provinsi Riau, sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan politik, pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa, meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata, meningkatkan peran swasta dalam pembangunan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru adalah :

1. Visi

“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”

2. Misi

- a. Mewujudkan pekanbaru kota cerdas melalui kreatif dan inovasi dengan dukungan teknologi dan infrastruktur dasar sebaik mungkin, yaitu jalan, air bersih, dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi (jalita) yang sesuai dengan kebutuhan kota, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota serta kualitas pelayanan yang cepat dan tepat.

- b. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, asri, aman, nyaman, dan damai melalui pembangunan yang ramah dengan lingkungan dan berkelanjutan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No. 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan lainnya
- 2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
 - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan tata ruang.
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
 - e. penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangannya.

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Sekretariat

- 1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.
 - b. perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
 - c. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
 - e. pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
 - f. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum.
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Program.

2) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

III. Sub Bagian Umum

- 1) Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2) Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan.
 - b. pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
 - c. pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.

- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
- e. pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- f. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
- g. pelaksanaan pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
- h. perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- i. perumusan dan pelaksanaan pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. Sub Bagian Keuangan

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNBPN dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas.
- c. pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. Sub Bagian Program

- 1) Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
- b. pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- c. perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- d. perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- e. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- f. pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. Bidang Sumber Daya Air

- 1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan sumber daya air.
- 2) Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja sumber daya air berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. pengoordinasian dan perumusan kegiatan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- c. pengoordinasian dan perumusan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
- d. pengoordinasian dan perumusan usulan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
- e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program perencanaan, pelaksanaan dan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
- f. penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian saran dan pertimbangan terhadap permasalahan yang terjadi pada Bidang Sumber Daya Air.
- g. penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- h. perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Sumber Daya Air.

- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air.
- b. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air.
- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

- 2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

VII. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air

- 1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan sub urusan perencanaan sumber daya air.
- 2) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Perencanaan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan pelaksanaan konstruksi dan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

- c. pelaksanaan analisa dan evaluasi kelayakan program dan rencana kegiatan bidang sumber daya air serta analisis mengenai dampak lingkungan.
- d. pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- e. perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Perencanaan Sumber Daya Air serta penyiapan bahan-bahan untuk pemecahan masalah.
- f. perumusan dan pelaksanaan kegiatan survey, pengukuran dan pengumpulan data pendukung, sistem informasi bidang sumber daya air.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VIII. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air

- 1) Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan sub urusan pelaksanaan sumber daya air.
- 2) Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- b. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik.
- c. perumusan dan pelaksanaan penyusunan program, prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air.
- d. pelaksanaan kegiatan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air meliputi pekerjaan konstruksi dan non konstruksi dan persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan.
- e. pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- f. perumusan dan pelaksanaan rekomendasi perizinan, pelaksanaan pengendalian banjir dan tanah longsor.
- g. perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air serta menyiapkan bahan-bahan untuk pemecahan masalah.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IX. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

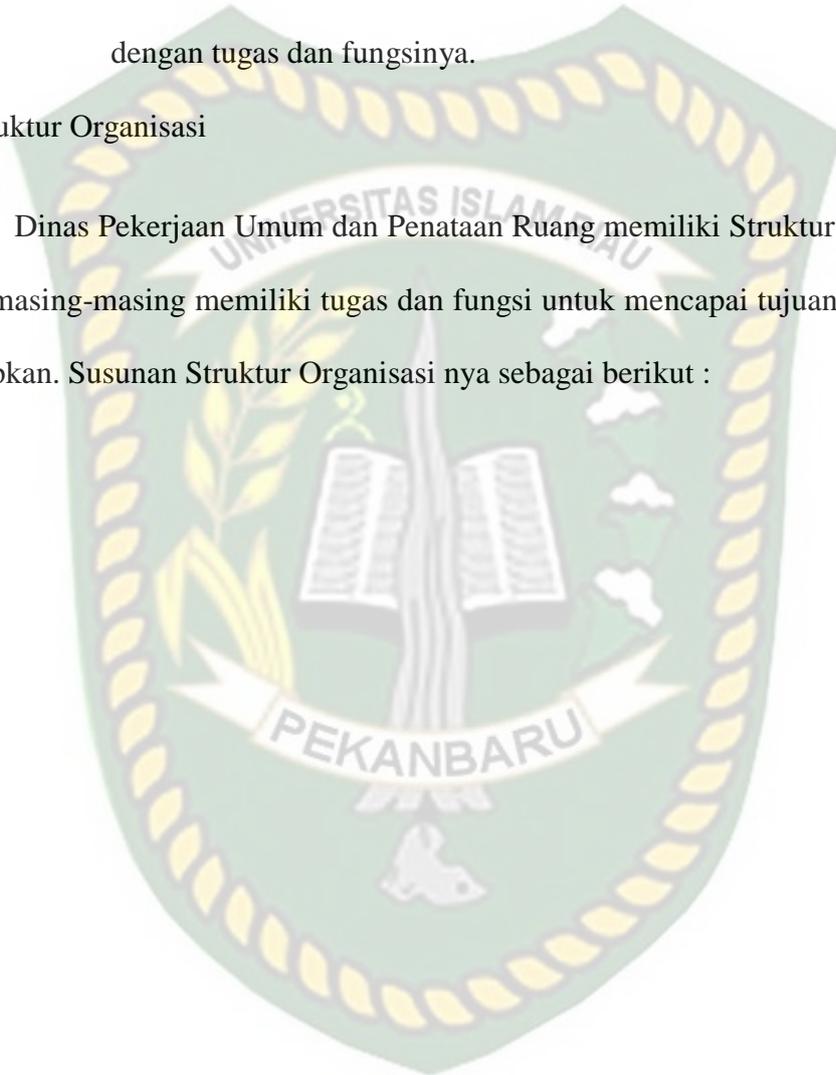
- 1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan sub urusan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
- 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik.
 - c. perumusan dan pelaksanaan penyusunan program, prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 - d. perumusan dan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air sesuai dengan petunjuk teknis pengembangan sumber daya air yang telah ditetapkan.
 - e. pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
 - f. perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Seksi

Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta penyiapan bahan-bahan untuk pemecahan masalah.

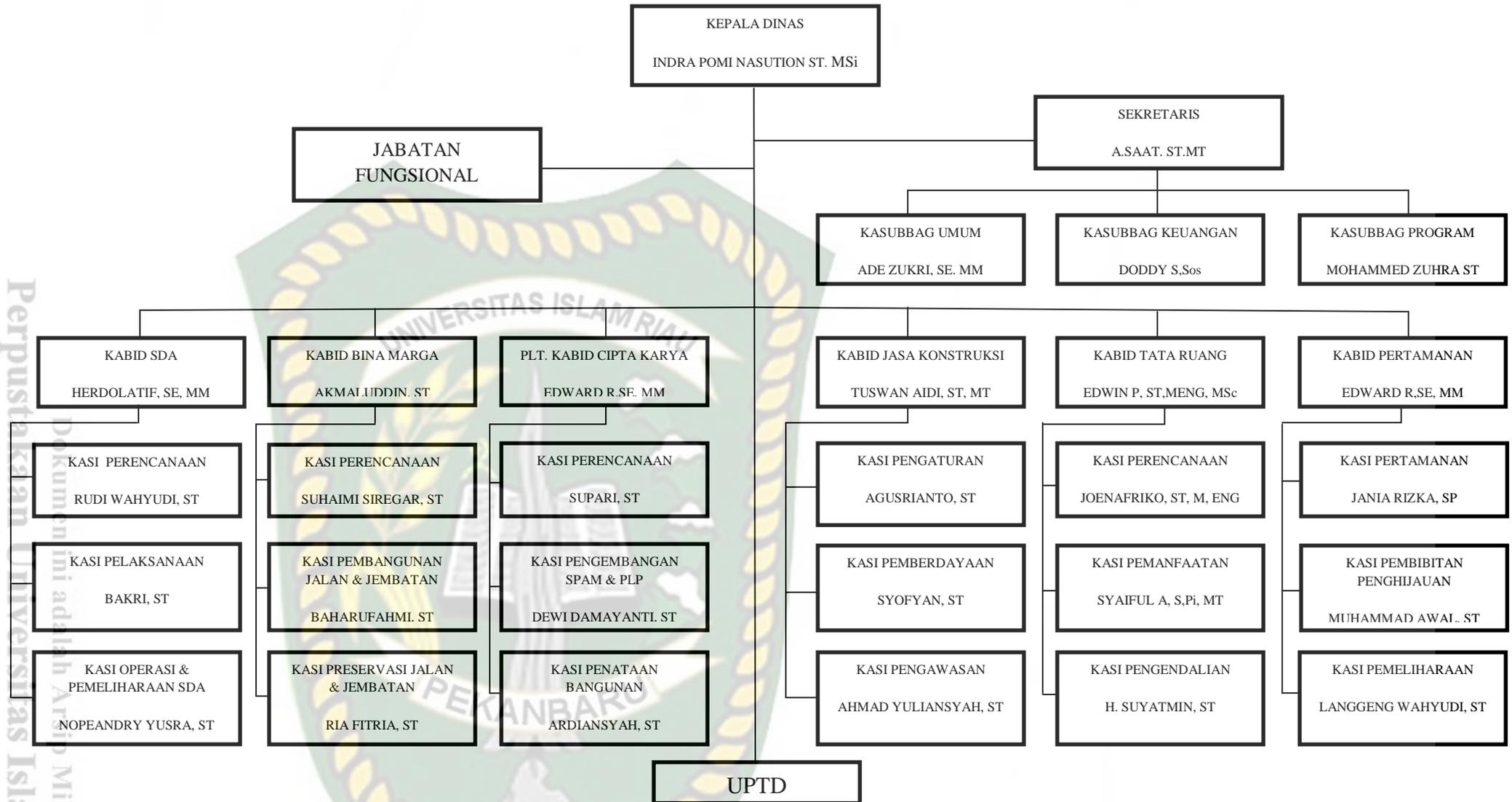
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki Struktur Organisasi yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Susunan Struktur Organisasi nya sebagai berikut :



Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR)



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arip Milik :

D. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka dibentuklah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru pada tahun 2001. Tugasnya adalah membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan kewenangan otonomi di bidang persampahan, pertamanan, penghijauan, lampu penerangan jalan umum dan lampu hias. Tugas utama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dimulai dari penyapuan, pengangkutan, pemusnahan hingga pengelolaan sampah.

Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru adalah :

1. Visi

“Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Kota Berwawasan Lingkungan Yang Madani”

2. Misi

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Mendukung Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Menciptakan Lingkungan Bersih Bebas Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

- c. Mengoptimalkan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - d. Melestarikan Sumber Daya Alam Dan Melaksanakan Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di lingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya.

Dasar pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di lingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya

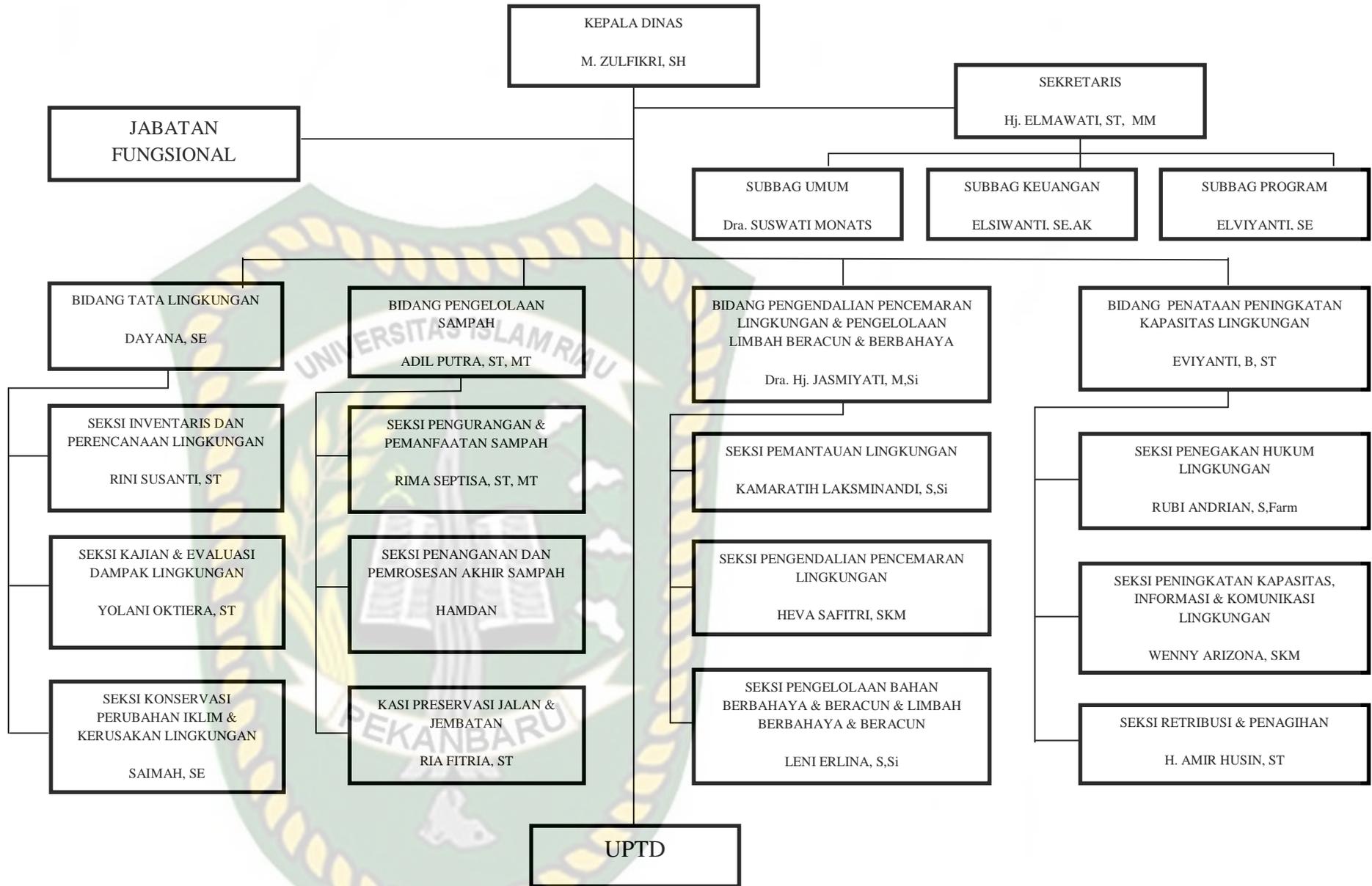
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
2. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
3. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

4. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
5. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
6. Pelaksanaan urusan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
7. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
8. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup dinas;
9. Pembinaan, Pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
10. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
11. Pengelolaan keuangan dinas;
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Kota Pekanbaru. Jika dilihat dari struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK), maka sistem yang dianut berbentuk Line Down Staff, dimana garis pertanggungjawaban atasan langsung kepada Sub Dinas dan apabila pimpinan dapat menunjuk salah seorang kepala Sub Dinas dengan pangkat dan masa kerja tertinggi diantara kepala Sub Dinas lainnya. Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dapat dilihat pada lampiran berikut :

Gambar IV.2 : Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK)



BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Identitas Responden

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat. Dengan bertemu beberapa responden secara langsung yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang serta Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan. Identitas responden yang ditemukan penulis adalah sebagai berikut :

Tabel V.1 : Identitas Key & Informan

a. Dinas PUPR

No	Nama	Jenis kelamin	Jabatan	Pendidikan
1.	Indra Pomi Nasution ST, M.Si	Laki-laki	Kepala Dinas PUPR	S2
2.	Alpa ST	Laki-laki	Kasi bidang SDA (PUPR)	S1

b. Dinas DLHK

No	Nama	Jenis kelamin	Jabatan	Pendidikan
3.	Adil Putra ST,MT	Laki-laki	Kabid Pengelolaan Sampah (DLHK)	S2
4.	Nofan Serwanto	Laki-laki	Kasi Bidang Pengelolaan Sampah	S1

Sumber : Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel diatas yang menjadi informan dari Dinas PUPR berjumlah 2 orang, dan dari Dinas DLHK berjumlah 2 orang. Yang menjadi key infoman dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas PUPR (Bapak Indra Pomi Nasution ST, M.Si) dan Kasi Bidang Pengelolaan Sampah (Bapak Nofan Serwanto ST).

Untuk mengetahui apakah koordinasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR dan Dinas DLHK memberikan hasil atau perubahan, peneliti melakukan wawancara dengan responden di sekitar titik-titik sering terjadinya banjir. Berikut data responden yang diwawancara oleh peneliti :

Tabel V.2 : Identitas Responden

No	Nama	Jenis kelamin	Pekerjaan	Umur
1.	Yusran	Laki-laki	Pedagang	52 thn
2.	Indriatno	Laki-laki	Ketua RT	45 thn

Sumber : olahan penulis, 2020

Berdasarkan tabel di atas, peneliti melakukan wawancara dengan 3 orang masyarakat yang terkena banjir di Kecamatan Tampan. Mulai dari masyarakat biasa hingga ketua RT. Peneliti melakukan wawancara dengan menanyakan 1 pertanyaan setiap sub indikator kepada responden.

B. Pembahasan Penelitian Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) SDalam Menangani Masalah Banjir Di Kecamatan Tampan

Dalam penelitian ini, terdiri dari 2 key informan yaitu, Bapak Kepala Dinas dan Bapak Kabid Pengelolaan sampah serta 2 informan yaitu Bapak Kasi Bidang Sumber Daya Air (Dinas PUPR) dan Bapak Kasi Pengelolaan Sampah (Dinas DLHK). Dan Terdiri dari 2 responden yaitu masyarakat asli Kecamatan Tampan yang pernah mengalami banjir. Data yang didapat oleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memenuhi kebutuhan dalam penelitian ini.

Dalam rangka mewujudkan Kota Pekanbaru yang berwawasan lingkungan madani, sesuai dengan visi Walikota Pekanbaru periode 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Smart City Madani” dengan salah satu misi nya yaitu “Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni dan Ramah Lingkungan”, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan melakukan koordinasi untuk mengatasi banjir yang terus terjadi setiap tahun nya, khususnya Kecamatan Tampan.

Handyaningrat (1985: 88), Koordinasi adalah usaha penyesuaian dari bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan dari bagian-bagian itu dapat selesai tepat pada waktunya, sehingga masing-masing anggota dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar diperoleh hasil secara keseluruhan.

Adapun koordinasi dapat diukur melalui indikator berikut :

1. Komunikasi

- a. Informasi
- b. Alur informasi
- c. Pemanfaatan teknologi informasi
2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi
 - a. Tingkat pengetahuan pelaksana
 - b. Tingkat keselarasan
3. Kompetensi Partisipan
 - a. Adanya pejabat yang berwenang
 - b. Adanya ahli di bidang pembangunan
4. Kesempatan, Kesepakatan, dan Insentif Koordinasi
 - a. Kesepakatan
 - b. Pelaksanaan kegiatan
 - c. Sanksi
 - d. Insentif
5. Kontinuitas Perencanaan
 - a. Umpan balik
 - b. Perubahan dari hasil kesepakatan

Hasil Wawancara Dengan Dinas PUPR

1. Komunikasi

Secara terminologis, komunikasi adalah proses penyampaian sebuah pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang dimana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain.

a. Informasi

Dalam berkoordinasi, tentu nya saling membutuhkan informasi antar kedua pihak yang terlibat. Informasi berguna sebagai pedoman dalam bekerja sama dan informasi juga sebagai sarana untuk meninjau perkembangan. Informasi

yang dimaksud disini adalah informasi terkait data-data perkembangan banjir, informasi rapat/pertemuan dan informasi kerjasama yang berkaitan dengan banjir.

Informan Dinas PUPR

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan yaitu Kepala Dinas PUPR Bapak Indra Pomi Nasution ST, M.Si sebagai berikut :

“Dalam melakukan koordinasi dengan Dinas DLHK, kami selalu berbagi informasi setidaknya sebulan sekali terkait masalah banjir. Kami selalu mengkomunikasikan dan melakukan rapat koordinasi minimal 1 kali dalam sebulan, dan jadwal ini tidak menentu, tergantung kepada kondisi. Kami saling berbagi data banjir, untuk penanganan jangka pendek dan panjang. Dinas PUPR bertanggung jawab atas sungai-sungai dan drainase, sedangkan Dinas DLHK bertanggung jawab atas sampah.”

(Rabu, 8 juli pukul 8.30 wib)

Responden Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Indriatno selaku Ketua RT di Kecamatan Tampan sebagai berikut :

“Informasi dalam koordinasi antara Dinas PUPR dan Dinas DLHK cukup akurat dan cepat. Karena kedua dinas ini langsung menurunkan satuan tugas nya ke lapangan jika terjadi banjir.””(Kamis, 16 juli pukul 17.00 wib)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, adanya saling berbagi informasi terkait banjir antara Dinas PUPR dan Dinas DLHK. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, peneliti juga melihat bahwa satuan tugas dari kedua dinas tersebut cepat dalam menangani ketika terjadi masalah banjir. Meskipun jika tidak terjadi banjir, satuan tugas tersebut memang sudah melakukan tugas dan fungsi nya secara rutin.

b. Alur informasi

Dalam melakukan koordinasi, alur informasi harus jelas agar tidak salah arah. Alur informasi sangat penting agar kedua pihak yang terlibat dapat memperoleh informasi dengan cepat.

Informan Dinas PUPR

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan yaitu Kasi Bidang Sumber Daya Air Bapak Alpa ST sebagai berikut :

“Alur informasi dalam koordinasi ini melalui forum KLHS (kajian lingkungan hidup sehat) di setiap tahun nya akan di adakan rapat koordinasi. Melalui forum tersebut kami berbagi informasi dan data terkait banjir. Dan jika kami mendapat laporan/keluhan dari masyarakat terkait masalah banjir, baik keluhan masyarakat yang langsung datang ke kantor, atau aduan melalui media telepon, kami dan Dinas DLHK langsung berkomunikasi via telepon kemudian melaksanakan rapat koordinasi setelahnya. Jika memang keadaan nya sangat parah, kami langsung menurunkan ke lapangan satuan tugas masing-masing untuk menangani permasalahan tersebut”.(Rabu, 8 juli pukul 10.00 wib)

Responden Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Indriatno selaku Ketua RT di Kecamatan Tampan sebagai berikut :

“Masih kurang nya sosialisasi kepada masyarakat dan kurang tegas nya sanksi yang diberikan. Sehingga banjir sulit di atasi jika tidak bekerja sama dengan masyarakat. ”.(Kamis, 16 juli pukul 17.00 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, alur informasi dalam koordinasi antara Dinas PUPR dengan Dinas DLHK sangat jelas yaitu melalui forum, pertemuan/rapat serta menggunakan media. Tetapi alur informasi kepada

masyarakat belum jelas karena hanya sampai kepada pihak kecamatan atau kelurahan dan tidak merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

c. Pemanfaatan teknologi informasi

Dalam koordinasi ini, tentu nya tidak lepas dari pemanfaatan teknologi informasi seperti yang dilakukan oleh Dinas PUPR dan Dinas DLHK. Pemanfaatan teknologi informasi mempermudah Dinas PUPR dan Dinas DLHK dalam berbagi informasi.

Informan Dinas PUPR

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan infroman yaitu Kepala Dinas PUPR Bapak Indra Pomi Nasution ST, M.Si sebagai berikut :

“Dalam koordinasi tentu nya kami menggunakan media teknologi untuk berbagi informasi. Kami berbagi informasi melalui bertemu secara langsung (rapat), telepon, komputer dan media sosial. Dan media yang sering kami gunakan dalam koordinasi ini adalah via email.”(Rabu, 8 juli pukul 8.30 wib)

Responden Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Indriatno selaku Ketua RT di Kecamatan Tampan sebagai berikut :

“Memang kedua dinas tersebut juga melakukan sosialisasi menggunakan media massa, namun belum efektif karena tidak memberikan kesadaran kepada masyarakat.””(Kamis, 16 juli pukul 17.00 wib)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa dalam melakukan koordinasi, Dinas PUPR dan Dinas DLHK sangat memanfaatkan teknologi informasi agar mempermudah proses kerjasama. Mulai dari pemanfaatan telepon,

komputer hingga media sosial untuk berbagi informasi, dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan observasi peneliti, peneliti menemukan sosialisasi/himbauan melalui media seperti palang atau spanduk yang dibuat oleh dinas tersebut. Hal ini membuktikan bahwa dalam berkoordinasi, Dinas PUPR dan Dinas DLHK memanfaatkan teknologi informasi.

Berdasarkan teori oleh Handayani (1985: 88), dalam koordinasi terdapat indikator komunikasi. Komunikasi diukur dari adanya informasi, alur informasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Karena adanya berbagi informasi terkait banjir, alur informasi yang jelas melalui pertemuan langsung atau menggunakan media serta pemanfaatan teknologi informasi oleh Dinas PUPR dan Dinas DLHK dalam berkoordinasi.

2. Kesadaran penting nya koordinasi

Dalam koordinasi, diperlukan kesadaran oleh pihak yang melaksanakannya. Kesadaran akan pentingnya koordinasi sangat penting, agar kesepakatan bersama bisa tercapai. Kesadaran akan pentingnya koordinasi karena saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan. Karena satu instansi tidak bisa bekerja sendiri, karena itu membutuhkan instansi lain untuk membantu mencapai tujuan, hal inilah menjadi dasar utama Dinas PUPR melakukan koordinasi dengan Dinas DLHK. Pada indikator kesadaran pentingnya koordinasi, item yang dinilai adalah tingkat pengetahuan pelaksana dan tingkat keselarasan dalam melakukan koordinasi.

a. Tingkat pengetahuan pelaksana

Sumber daya manusia dalam berkoordinasi sangat berperan penting agar lebih efisien dan efektif dalam menjalankan tugas yang telah ditetapkan. Tingkat pengetahuan juga menentukan kualitas dari kerjasama tersebut. Maksud tingkat pengetahuan pelaksana disini adalah bagaimana para petugas memahami akan tugas dan fungsinya, baik pegawai di kantor maupun petugas lapangan dari Dinas PUPR dan Dinas DLHK. Dinas melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota. Dalam melakukan pelaksanaan tugas, Dinas memiliki satuan tugas yang bertugas di lapangan.

Informan Dinas PUPR

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan yaitu Kasi Bidang Sumber Daya Air Bapak Alpa ST sebagai berikut :

“Dalam melakukan kerjasama dan koordinasi, tentunya kami sangat memperhatikan tingkat pengetahuan dan kualitas petugas kami. Baik petugas kantor hingga petugas lapangan. Setiap petugas sudah diberikan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Kami selalu memberi arahan dan pengawasan terhadap para petugas agar tidak keluar dari tupoksi. Hingga saat ini seluruh petugas kami sudah paham akan tugasnya masing-masing”(Rabu, 8 juli pukul 10.00 wib)

Responden Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Indriatno selaku Ketua RT di Kecamatan Tampan sebagai berikut :

“Untuk menangani banjir, kedua dinas tersebut memiliki satuan tugas yang disebar ke berbagai titik. Satuan tugas ini memang bekerja sesuai dengan tupoksinya. Seperti membersihkan drainase, menggali tanah yg

ada di dalam drainase dan juga membersihkan tumbuhan-tumbuhan yg menyebar di sekitar drainase.”(Kamis, 16 juli pukul 17.00 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung oleh peneliti, Dinas PUPR dan Dinas DLHK melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang telah diberikan. Baik pegawai di kantor maupun satuan tugas lapangan. Tugas dan fungsi tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 93 & 94 Tahun 2016.

b. Tingkat keselarasan

Keselarasan atau kesatupaduan dalam koordinasi sangat diperlukan agar sejalan dalam mencapai tujuan bersama. Keselarasan dan kesatupaduan bertujuan agar tidak ada tumpang tindih dalam melakukan tugas. Masing-masing Dinas melaksanakan tugas dan fungsi yang telah di tetapkan. Maksudnya adalah tidak ada campur tangan dalam tugas masing-masing. Dengan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dinas akan mempermudah dan meminimalisir terjadinya banjir.

Informan Dinas PUPR

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan yaitu Kasi Bidang Sumber Daya Air Bapak Alpa ST sebagai berikut :

“Sejauh ini keselarasan dalam kerjasama tersebut sangat baik. Karena dari koordinasi yang dilakukan memberikan hasil yang baik, yaitu berhasil menuntaskan beberapa titik banjir.”(Rabu, 8 juli pukul 10.00 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa kedua dinas tersebut fokus terhadap tupoksi masing-masing.

Dengan adanya Dinas DLHK yang bertanggung jawab atas sampah, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan, dan Dinas PUPR rutin melakukan pembersihan drainase secara rutin, dengan begitu bisa meminimalisir terjadinya banjir.

Menurut teori oleh Handayani (1985: 88), terdapat indikator kesadaran pentingnya koordinasi, item yang dinilai adalah tingkat pengetahuan pelaksana dan tingkat keselarasan. Menurut observasi oleh peneliti, dalam koordinasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR dan Dinas DLHK, tingkat pengetahuan pelaksana sudah terlaksana karena sudah memahami akan tugas masing-masing. Tingkat keselarasan juga sudah terlaksana karena kedua dinas tersebut saling mengerjakan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang ditetapkan. Dengan melaksanakan tugas masing-masing, seperti PUPR melakukan pembersihan rutin terhadap drainase, dan Dinas DLHK rutin melakukan pembersihan lingkungan, dengan begitu bisa meminimalisir terjadinya banjir.

3. Kompetensi partisipan

Dalam melakukan koordinasi, tentu adanya kompetensi dari partisipan. Sumber daya manusia dan sumber daya organisasi harus memiliki kompetensi yang mumpuni agar mampu melaksanakan tugas dan bekerja sama dengan baik. Dalam menangani masalah banjir, Dinas PUPR tidak bisa bekerja sendiri, Dinas PUPR membutuhkan instansi lain untuk membantu mencapai hal tersebut. Karena pada dasarnya banjir adalah tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah.

Pada indikator kompetensi partisipan, item yang dinilai adalah adanya pejabat yang berwenang dan adanya ahli di bidang pembangunan.

a. Adanya pejabat yang berwenang

Dalam koordinasi ini tentu nya ada pihak-pihak yang terlibat agar bisa mencapai tujuan bersama. Permasalahan banjir melibatkan banyak pihak, mulai dari masyarakat hingga pemerintah pusat. Karena pada dasarnya, banjir menjadi tanggung jawab bersama yang harus diatasi.

Informan Dinas PUPR

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan yaitu Kepala Dinas PUPR Bapak Indra Pomi Nasution ST, M.Si sebagai berikut :

“kami melakukan koordinasi dengan banyak instansi lain yang terkait, bukan hanya dengan dinas DLHK saja. Karena banjir ini cakupannya luas dan tidak bisa kami atasi sendiri”. (Rabu, 8 juli pukul 8.30 wib)

Responden Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Indriatno selaku Ketua RT di Kecamatan Tampan sebagai berikut :

“Sampai saat ini sosialisasi dari kedua dinas tersebut hanya sampai pada tingkat kecamatan/kelurahan, tidak sampai merata kepada masyarakat. Sedangkan untuk kegiatan kebersihan hanya dari kesadaran masyarakat sendiri.” (Kamis, 16 juli pukul 17.00 wib)

Berdasarkan wawancara tersebut, Dijelaskan bahwa Dinas PUPR bukan hanya berkoordinasi dengan Dinas DLHK, tetapi juga dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penanganan masalah banjir. Baik koordinasi yang berskala antar kota/kabupaten, tetapi juga koordinasi dengan provinsi bahkan ke nasional.

Tetapi koordinasi masih lemah kepada masyarakat, karena masyarakat membersihkan lingkungan atas dasar kesadaran sendiri atau himbauan dari Ketua RT.

b. Adanya ahli di bidang pembangunan

Dalam berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama, tentu nya memiliki perencanaan pembangunan, baik perencanaan jangka pendek maupun pembangunan jangka panjang. Dalam melakukan pembangunan, tentu nya tidak lepas dari pihak-pihak yang ikut terkait. Mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat nasional, semua ikut berperan agar pembangunan bisa berhasil. Pembangunan yang dimaksud adalah perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pengawasan terhadap drainase, sungai dan anak sungai.

Informan Dinas PUPR

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan yaitu Kasi Bidang Sumber Daya Air Bapak Alpa ST sebagai berikut :

“Yang memegang peran ahli di bidang pembangunan dalam koordinasi ini tentu nya Bapak Kepala Dinas PUPR, yang berpedoman kepada peraturan Walikota dan juga peraturan dari nasional. Dalam pembangunan, kami juga di bantu oleh Dinas PU Provinsi, pemerintah kota dan pihak-pihak lain yang terlibat. Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2016 bagian kesatu pasal 4 yaitu Kepala Dinas PUPR membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang”(Rabu, 8 juli pukul 10.00 wib)

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, pembangunan memang sudah dilaksanakan, tetapi peneliti masih menemukan beberapa drainase-drainase yang rusak dan hancur. Seharusnya drainase yang rusak dan hancur segera diperbaiki,

karena jika dibiarkan air tidak dapat mengalir dengan baik dan menyebabkan banjir. Pembangunan drainase dilakukan oleh Dinas PUPR yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Saat ini Dinas PUPR akan terus melakukan pembangunan drainase dan master plan penanganan banjir yang lebih baik. Dalam hal pembangunan, Dinas PUPR juga di bantu oleh Dinas PU provinsi dan pemerintah kota sesuai dengan Peraturan Menteri No 12 Tahun 2014.

Berdasarkan teori Handyaningrat (1985: 88), dalam koordinasi terdapat indikator kompetensi partisipan, item yang dinilai adalah adanya pejabat yang berwenang dan adanya ahli di bidang pembangunan. Dalam koordinasi ini banyak pejabat berwenang yang terkait dalam menangani banjir, baik pejabat dari tingkat kelurahan hingga pejabat tingkat nasional. Adanya ahli di bidang pembangunan sudah terlaksana. Karena pembangunan drainase dilakukan oleh Dinas PUPR.

4. Kesempatan, kesepakatan dan insentif

Dalam berkoordinasi, tentu ada kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Kesepakatan yang dibuat sesuai dengan pembagian tugas. Pembagian tugas bertujuan agar pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisiensi. Pada indikator ini, item yang dinilai adalah adanya kesepakatan, pelaksanaan kegiatan, sanksi dan insentif.

a. Kesepakatan

Kesepakatan yang dibuat antara Dinas PUPR dan Dinas DLHK yaitu saling berbagi informasi untuk di proses kelanjutannya. Tidak ada kesepakatan

yang begitu spesifik, hanya saling berkoordinasi meninjau perkembangan masalah banjir.

Informan Dinas PUPR

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan yaitu Kepala Dinas PUPR yaitu Bapak Indra Pomi Nasution ST, M. sebagai berikut :

“Kesepakatan yang kami buat dengan Dinas DLHK hanya saling berbagi data dan informasi, kemudian melakukan tugas pada jalur nya masing-masing. Kami selalu memperbarui informasi setiap bulan nya untuk terus di kaji dan di evaluasi.” (Rabu, 8 juli pukul 8.30 wib)

Berdasarkan wawancara tersebut, dijelaskan bahwa kesepakatan yang dilakukan hanya sebatas saling berkomunikasi dan melakukan pertemuan/rapat untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Pada dasarnya sebelum koordinasi dilakukan, Dinas PUPR dan Dinas DLHK sudah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Tetapi dengan adanya koordinasi tentu nya juga mempermudah dalam penanganan masalah banjir, karena banjir tidak bisa di atasi oleh Dinas PUPR saja. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, peneliti melihat tidak ada kesepakatan yang begitu spesifik. Peneliti melihat kedua dinas tersebut fokus pada tugas masing-masing.

b. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dalam koordinasi ini meliputi tupoksi masing-masing dinas berdasarkan Peraturan Walikota yang telah ditetapkan. Tupoksi Dinas PUPR berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2016, dan tupoksi Dinas DLHK berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2016. Pada

dasarnya kedua dinas ini memang selalu berdampingan dan membutuhkan satu sama lain dalam menangani banjir.

Informan Dinas PUPR

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan yaitu Kepala Dinas PUPR Bapak Indra Pomi Nasution ST, M.Si sebagai berikut :

“Tentu nya kami melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur). Dinas DLHK dengan tugas nya, dan Dinas PUPR dengan tugas nya pula. Kepala dinas membawahi Kabid, dan Kabid menggerakkan serta mengawasi bawahan dan anggota nya dalam setiap pelaksanaan kegiatan kerja. Satgas melakukan tugas 1 sekali dalam seminggu untuk membersihkan sampah yang ada di drainase. Tugas ini dilakukan setiap hari sabtu dengan total 2 truk dan 20 orang petugas setiap kecamatan. Ketika banjir satgas langsung turun ke titik-titik banjir yang sangat parah dan membersihkan drainase tersebut, satgas kami hanya membersihkan drainase, dan yg mengangkut sampah nya adalah satuan tugas Dinas DLHK.” (Rabu, 8 juli pukul 8.30 wib)

Responden Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Indriatno selaku Ketua RT di Kecamatan Tampan sebagai berikut :

“Dinas PUPR dan Dinas DLHK sejauh ini memang sudah berupaya semaksimal mungkin dalam mengatasi banjir. Namun yang perlu diperhatikan adalah kesadaran masyarakat itu sendiri agar berhasil tujuan yang ingin dicapai.” (Kamis, 16 juli pukul 17.00 wib)

Berdasarkan wawancara tersebut, menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP dan diawasi oleh setiap kepala bidang terhadap anggota nya. Dengan adanya observasi langsung ke lapangan yang dilakukan oleh peneliti, dan memang benar bahwa satuan tugas tersebut melaksanakan tugas nya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Namun kedua dinas tersebut harus

giat dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat, agar kerjasama tersebut memberikan hasil yang baik.

c. Sanksi

Sanksi adalah hukuman atau tanggung jawab terhadap pelanggaran kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan sanksi adalah agar menaati dan patuh terhadap peraturan-peraturan dalam organisasi. Dalam koordinasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR dan Dinas DLHK tidak terdapat sanksi yang mengikat, karena pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

Informan Dinas PUPR

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan yaitu Kasi Bidang Sumber Daya Air Bapak Alpa ST sebagai berikut :

“Meskipun kami terus melakukan koordinasi dengan Dinas DLHK, tetapi kami tidak ada yang namanya sanksi. Karena kami melakukan tugas pada jalur masing-masing. Karena setiap dinas sudah memiliki tugas dan fungsi berdasarkan peraturan walikota dan peraturan daerah. Sanksi ada untuk masyarakat yang melanggar peraturan yang telah dibuat. Seperti contoh kami sudah membuat palang himbauan diberbagai tempat agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan.”(Rabu, 8 juli pukul 10.00 wib)

Responden Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Indriatno selaku Ketua RT di Kecamatan Tampan sebagai berikut :

“Sebenarnya sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan sudah ada sejak lama. Hanya saja masyarakat yang tidak patuh terhadap pertauran yang telah dibuat. dan juga sanksi yang ada tidak membuat masyarakat jera.”(Kamis, 16 juli pukul 17.00 wib)

Berdasarkan wawancara tersebut, dijelaskan bahwa sanksi dalam koordinasi ini tidak ada. Tetapi ada sanksi bagi masyarakat yang melanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan observasi peneliti, peneliti tidak menemukan sanksi antara Dinas PUPR dan Dinas DLHK. Tetapi peneliti menemukan sanksi bagi masyarakat yang melanggar peraturan yang telah dibuat, seperti membuang sampah ke sungai, drainase dan dijalan. Seperti aturan yang dibuat oleh Dinas DLHK yaitu tidak boleh membuang sampah Ke TPA diluar jam buangan yang telah ditetapkan. Jika ada yang melanggar, tim satuan tugas dari Dinas DLHK akan melakukan pemantau secara rutin.

d. Insentif

Untuk meningkatkan semangat kerja pegawai dalam sebuah organisasi, perlu adanya pemberian kompensasi khusus yang disebut insentif. Pemberian bonus dan insentif kepada pegawai dapat mendorong motivasi kerja pegawai menjadi lebih baik lagi. Namun di dalam koordinasi antara Dinas PUPR dan Dinas DLHK tidak ada insentif karena koordinasi dilakukan atas kesadaran pentingnya koordinasi karena saling membutuhkan satu sama lain dalam menangani permasalahan banjir.

Informan Dinas PUPR

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan yaitu Kasi Bidang Sumber Daya Air Bapak Alpa ST sebagai berikut :

“Insentif dalam koordinasi ini tidak ada. Karena untuk melakukan koordinasi memang sudah menjadi kesadaran dan tanggung jawab kami.

Karena dampak positif dari koordinasi ini saling menguntungkan bagi kami dan Dinas DLHK.”(Rabu, 8 juli pukul 10.00 wib)

Berdasarkan wawancara tersebut, menyatakan bahwa tidak ada kompensasi atau bonus khusus dari kerjasama tersebut. Karena pada dasarnya koordinasi dilakukan atas dasar keharusan karena saling membutuhkan.

Berdasarkan teori oleh Handayani (1985: 88), indikator kesepakatan, kesempatan dan insentif diukur dari adanya kesepakatan, adanya pelaksanaan kegiatan, sanksi dan insentif. Dalam koordinasi ini, penilaian pada indikator ini cukup terlaksana, karena tidak ada kesepakatan yang begitu mengikat karena kedua dinas hanya saling berbagi informasi dan melaksanakan tugas masing-masing, adanya pelaksanaan kegiatan oleh kedua dinas tersebut yang langsung turun ke lapangan. Tetapi dalam koordinasi ini tidak ada sanksi dan insentif yang diberikan.

5. Kontinuitas Perencanaan

Perencanaan adalah proses menjelaskan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan adalah proses penentuan harus dilakukan dan bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut dan Pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.

Perencanaan berkelanjutan bertujuan untuk menjadi acuan bagi suatu instansi untuk melakukan tugas beberapa tahun ke depan. Perencanaan ini diperkirakan untuk 5 tahun, 10 tahun bahkan 20 tahun ke depan. Tujuannya agar mampu untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan berkelanjutan akan terus dilakukan oleh

Dinas PUPR dan Dinas DLHK agar benar-benar berhasil menuntaskan masalah banjir yang terjadi setiap tahun nya.

a. Umpan balik

Dari koordinasi yang dilakukan diharapkan memberikan umpan balik bagi pelaksana dan juga masyarakat. Jika umpan balik bersifat positif, maka koordinasi yang dilakukan sudah berhasil.

Informan Dinas PUPR

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan yaitu Kasi Bidang Sumber Daya Air Bapak Alpa ST sebagai berikut :

“Umpan balik yang kami terima dari koordinasi ini yaitu masyarakat mulai memperhatikan sampah berkat adanya himbuan dan sanksi berdasarkan perda no 08 tahun 2014. Meskipun belum sepenuhnya berhasil mengatasi sampah, tapi mengalami peningkatan kesadaran dari masyarakat. Peran DLHK sangat berpengaruh dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Karena itu kerjasama dengan Dinas DLHK sangat menguntungkan bagi kami.”(Rabu, 8 juli pukul 10.00 wib)

Responden Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Indriatno selaku Ketua RT di Kecamatan Tampan sebagai berikut :

“Umpan balik yang diterima masyarakat dari koordinasi ini adalah sebagian ada yang mulai mematuhi peraturan dan sebagian masih ada yg melanggar. Belum sepenuhnya di patuhi oleh masyarakat.”(Kamis, 16 juli pukul 17.00 wib)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, umpan balik dari masyarakat terhadap koordinasi antar kedua dinas cukup memberikan dampak yang cukup baik, ada sebagian masyarakat yang sudah mulai sadar dan patuh terhadap

peraturan, dan ada sebagian masyarakat yang masih melanggar peraturan yang telah dibuat. Namun koordinasi ini tidak boleh berhenti, Dinas PUPR dan Dinas DLHK harus berupaya dalam menangani masalah banjir dan juga memberikan edukasi/sosialisasi kepada masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan dan terbebas dari banjir.

b. Perubahan dari hasil kesepakatan

Dengan melakukan koordinasi, tentu nya mengharapkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Dari ada atau tidak nya perubahan tersebut dapat diukur berhasil atau tidak nya koordinasi yang dilakukan.

Informan Dinas PUPR

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan yaitu Kepala Dinas PUPR Bapak Indra Pomi Nasution ST, M.Si sebagai berikut :

“Berkat kerjasama dan koordinasi dengan Dinas DLHK, kami berhasil menuntaskan 13 titik banjir di tahun 2019. Pada akhir tahun 2020 kami menargetkan untuk menuntaskan 15 titik banjir lagi. Dengan melaksanakan tugas masing-masing, kami saling terbantu dalam meminimalisir banjir.” (Rabu, 8 juli pukul 8.30 wib)

Responden Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Indriatno selaku Ketua RT di Kecamatan Tampan sebagai berikut :

“Banjir memang sulit diatasi, tetapi kedua dinas tersebut sudah berupaya dengan baik, yaitu meminialisir terjadinya banjir. Perlu di tingkatkan lagi, dan kerjasama antara pihak yang terlibat harus lebih baik lagi dan perlu nya peran dari masyarakat.” (Kamis, 16 juli pukul 17.00 wib)

Berdasarkan wawancara tersebut, menyatakan bahwa melalui koordinasi ini memberikan dampak yang positif. Kerjasama antara kedua dinas ini dapat meminimalisir terjadinya banjir, bukan berarti banjir hilang permanen, tetapi meminimalisir, yang biasanya genangan banjir dari 4 jam menjadi hanya 1 jam. Berdasarkan observasi peneliti, peneliti melihat bahwa kedua dinas tersebut sudah melakukan tugas masing-masing dengan baik. Peneliti sering melihat kedua dinas tersebut melakukan pembersihan drainase oleh Dinas PUPR dan pembersihan lingkungan oleh Dinas DLHK.

Menurut teori oleh Handayani (1985: 88), terdapat indikator kontinuitas perencanaan dalam koordinasi, item yang dinilai adalah umpan balik dan perubahan dari hasil kesepakatan. Pada indikator ini adanya umpan balik dan perubahan positif dari koordinasi yang dilakukan, yaitu Dinas PUPR terbantu oleh Dinas DLHK dalam menangani banjir. Namun kedua dinas tersebut masih harus terus melakukan sosialisasi/himbauan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Penilaian pada indikator kontinuitas perencanaan sudah terlaksana.

Hasil Wawancara Dengan Dinas DLHK

1. Komunikasi

Komunikasi dalam penelitian ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR dan Dinas DLHK, yaitu berbagi informasi dalam bekerja sama. Agar koordinasi berjalan dengan baik dan tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan adanya hubungan komunikasi antara Dinas PUPR dan Dinas DLHK.

Komunikasi ini bertujuan agar selalu terarah pada tujuan yang akan dicapai. Dari indikator komunikasi, item penilaian yaitu adanya informasi, alur informasi dan pemanfaatan teknologi dalam koordinasi ini.

a. Informasi

Informan Dinas DLHK

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Adil Putra ST,MT selaku Kabid Bidang Pengelolaan Sampah sebagai berikut :

“Dinas DLHK memang melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR, karena banjir menjadi tanggung jawab PUPR, sedangkan sampah yang menjadi penyebab banjir adalah tanggung jawab kami. Oleh karena itu kami bekerja sama dalam mengatasi masalah banjir. Komunikasi yang dilakukan adalah saling memberi informasi terbaru terkait banjir. Jika ada masalah, kami langsung turun ke lapangan untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab kami. Kami mengangkut sampah-sampah yang tersumbat pada drainase-drainase.” (Senin, 13 juli pukul 09.00 wib)

Responden Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Yusran selaku masyarakat Kecamatan Tampan sebagai berikut :

“Jika sedang banjir, kedua dinas ini memang cepat turun ke lapangan untuk melakukan tugas nya. kedua dinas ini cepat memproses informasi yang mereka dapatkan dari masyarakat untuk di tindak lanjuti.”(Kamis, 16 juli pukul 16.30 wib)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, adanya saling berbagi informasi terkait banjir antara Dinas PUPR dan Dinas DLHK. Kedua Dinas tersebut selalu mengupdate informasi terbaru setiap bulan nya.

b. Alur Informasi

Informan Dinas DLHK

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Adil Putra ST,MT selaku Kabid Bidang Pengelolaan sebagai berikut :

“Untuk alur informasi dalam koordinasi ini, Dinas PUPR selalu berkomunikasi dengan kami rutin setiap bulan nya. Dinas PUPR selalu memberikan data terbaru titik-titik banjir untuk kami evaluasi bersama melalui rapat koordinasi. Kami melakukan rapat koordinasi minimal sebulan sekali”(Senin, 13 juli pukul 09.00 wib)

Responden Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Yusran selaku masyarakat Kecamatan Tampan sebagai berikut :

“Alur informasi yang sampai kepada masyarakat masih belum sepenuhnya jelas. Sosialisasi yang dilakukan kedua dinas tersebut belum merata sampai kepada masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang belum paham dan lalai terhadap peraturan yang telah dibuat. Kurang tegasnya himbauan dan sanksi, karena hal inilah yang menyebabkan masyarakat lalai terhadap sampah yang menjadi penyebab banjir.”(Kamis, 16 juli pukul 16.30 wib)

Alur informasi dalam koordinasi Dinas PUPR dan Dinas DLHK yaitu melalui pertemuan atau rapat, forum kajian, via whatsapp, email. Hanya saja alur informasi atau sosialisasi terhadap masyarakat masih kurang.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Informan Dinas DLHK

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Adil Putra ST,MT selaku Kabid Bidang Pengelolaan Sampah sebagai berikut :

“Dinas DLHK dan Dinas PUPR memang rutin melakukan koordinasi, selain rapat/pertemuan, kami juga memanfaatkan teknologi informasi seperti telepon dan komputer hingga media sosial untuk mempermudah proses berbagi informasi yang cepat.”(Senin, 13 juli pukul 09.00 wib)

Responden Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Yusran selaku masyarakat Kecamatan Tampan sebagai berikut :

“Kedua Dinas tersebut juga ada melakukan sosialisasi menggunakan media massa, seperti lewat koran dan internet untuk menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terjadi banjir.””(Kamis, 16 juli pukul 16.30 wib)

Dalam koordinasi ini sangat memanfaatkan teknologi informasi yang mempermudah kedua Dinas untuk saling berbagi informasi, selain cepat dan juga mudah prosesnya.

Berdasarkan teori oleh Handayani (1985: 88), dalam koordinasi terdapat indikator komunikasi. Komunikasi diukur dari adanya informasi, alur informasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Karena adanya berbagi informasi terkait banjir, alur informasi yang jelas melalui pertemuan langsung atau menggunakan media serta pemanfaatan teknologi informasi oleh Dinas PUPR dan Dinas DLHK dalam berkoordinasi.

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

- a. Tingkat pengetahuan pelaksana

Informan Dinas DLHK

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Adil Putra ST,MT selaku Kabid Bidang Pengelolaan Sampah sebagai berikut :

“Untuk penanganan terhadap masalah sampah, kami memiliki petugas yang tersebar di berbagai kecamatan. Khususnya kecamatan Tampan, kami memiliki 29 orang petugas kebersihan/tukang sapu dan 10 truk pengangkut sampah yang bertugas setiap hari nya. Berdasarkan perda no 08 tahun 2014, pengangkutan sampah dilakukan pada pukul 7 malam hingga pukul 5 pagi, sehingga pagi hari keadaan lingkungan harus steril dari sampah. Dan di dalam perda tersebut juga terdapat himbauan dan sanksi untuk masyarakat tentang sampah. Setiap petugas Dinas DLHK memiliki tupoksi masing-masing dan sudah melaksanakan tugas nya dengan baik.” (Senin, 13 juli pukul 09.00 wib)

Tabel V.3 : Jumlah Satuan Tugas Penanganan Banjir

No	Instansi	Jumlah Petugas	Sarana dan Prasarana
1.	Dinas PUPR	1 tim (20 orang, satuan tugas lapangan)	Truk, cangkul, ember, gerobak, alat pemotong rumput, parang.
2.	Dinas DLHK	1 tim (29 orang, satuan pembersih)	Truk, sapu, skop, keranjang sampah

Sumber: Dinas PUPR dan Dinas DLHK

Responden Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Yusran selaku masyarakat Kecamatan Tampan sebagai berikut :

“Satuan tugas kedua dinas tersebut memang mudah ditemui di berbagai tempat. Khususnya Kecamatan Tampan sering dijumpai di Jl. HR. Soebrantas, yaitu drainase-drainase besar yang menyebabkan banjir.”(Kamis, 16 juli pukul 16.30 wib)

Berdasarkan wawancara tersebut, kedua Dinas masing-masing memiliki satuan tugas yang telah paham akan tugas nya masing-masing. Karena setiap kepala bidang akan mengarahkan dan mengawasi setiap anggotanya.

b. Tingkat Keselarasan

Informan Dinas DLHK

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Adil Putra ST,MT selaku Kabid Bidang Pengelolaan Sampah sebagai berikut :

“Tentu nya kekompakan dalam kerjasama sangat di perlukan agar sejalan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama kami dengan Dinas PUPR rutin dilakukan agar meminimalisir terjadinya banjir.”(Senin, 13 juli pukul 09.00 wib)

Responden Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Yusran selaku masyarakat Kecamatan Tampan sebagai berikut :

“Seperti yg saya lihat, kekompakan kedua dinas tersebut dalam bekerja sama sudah baik. koordinasi ini harus terus dilakukan agar bisa menuntaskan banjir.”(Kamis, 16 juli pukul 16.30 wib)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tingkat keselaran kedua Dinas tersebut dalam menjalankan tugas terlihat saat kedua Dinas melaksanakan tugas nya masing-masing. Dinas PUPR bertanggung jawab atas drainase dan Dinas DLHK bertanggung jawab atas sampah.

Menurut teori oleh Handayaniingrat (1985: 88), terdapat indikator kesadaran pentingnya koordinasi, item yang dinilai adalah tingkat pengetahuan pelaksana dan tingkat keselarasan. Menurut observasi oleh peneliti, dalam

koordinasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR dan Dinas DLHK, tingkat pengetahuan pelaksana sudah terlaksana karena sudah memahami akan tugas masing-masing. Tingkat keselarasan juga sudah terlaksana karena kedua dinas tersebut saling mengerjakan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang ditetapkan. Dengan melaksanakan tugas masing-masing, seperti PUPR melakukan pembersihan rutin terhadap drainase, dan Dinas DLHK rutin melakukan pembersihan lingkungan, dengan begitu bisa meminimalisir terjadinya banjir.

3. Kompetensi Partisipan

- a. Adanya pejabat yang berwenang

Informan Dinas DLHK

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Adil Putra ST,MT selaku Kabid Bidang Pengelolaan Sampah sebagai berikut :

“Memang dalam mengatasi masalah banjir, banyak pihak yang terlibat. Kami juga salah satunya yang terlibat untuk membantu Dinas PUPR untuk menuntaskan masalah banjir.”(Senin, 13 juli pukul 09.00 wib)

Tabel V.4 : Daftar Instansi Koordinasi Dinas PUPR

No	Instansi	Tingkat
1.	Kementrian PUPR	Pemerintah Pusat
2.	Badan Wilayah Sungai Sumatera	Pemerintah Pusat
3.	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Pemerintah Daerah
4.	Kepala Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah
5.	Kecamatan dan Kelurahan	Pemerintah Daerah

Sumber: Wawancara Penelitian, 2020

Responden Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Yusran selaku masyarakat Kecamatan Tampan sebagai berikut :

“Sebagai masyarakat, kami belum sepenuhnya merasakan efek dari koordinasi yang dilakukan oleh kedua dinas tersebut. Mungkin hanya sampai pada tingkat desa/kelurahan. Sedangkan untuk melakukan kegiatan gotong royong hanya atas dasar kesadaran dari Ketua RT untuk menghimbau masyarakatnya melaksanakan kegiatan tersebut.”(Kamis, 16 juli pukul 15.30 wib)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa dalam penanganan banjir ini akan melibatkan banyak instansi-instansi lain yang berhubungan, karea banjir ini mencakupi wilayah yang luas.

b. Adanya ahli di bidang pembangunan

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Adil Putra ST,MT selaku Kabid Bidang Pengelolaan Sampah sebagai berikut :

“Untuk masalah pembangunan itu adalah tanggung jawab Dinas PUPR, dan diluar tanggung jawab kami. Karena kami berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk menangani masalah banjir.”(Senin, 13 juli pukul 09.00 wib)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab Dinas PUPR, dan Dinas DLHK tidak mempunyai urusan dalam hal pembangunan.

Berdasarkan teori Handyaningrat (1985: 88), dalam koordinasi terdapat indikator kompetensi partisipan, item yang dinilai adalah adanya pejabat yang berwenang dan adanya ahli di bidang pembangunan. Dalam koordinasi ini banyak pejabat berwenang yang terkait dalam menangani banjir, baik pejabat dari tingkat

kelurahan hingga pejabat tingkat nasional. Adanya ahli di bidang pembangunan sudah terlaksana. Karena pembangunan drainase dilakukan oleh Dinas PUPR.

4. Kesepakatan, Kesempatan dan Insentif Koordinasi

a. Kesepakatan

Informan Dinas DLHK

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Adil Putra ST,MT selaku Kabid Bidang Pengelolaan Sampah sebagai berikut :

“Tidak ada kesepakatan yang begitu spesifik, hanya saja kami saling berkomunikasi dan mengevaluasi perkembangan setiap bulan nya.”(Senin, 13 juli pukul 09.00 wib)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa kesepakatan yang dilakukan hanya sebatas berbagi informasi dan selalu melakukan rapat koordinasi setiap bulan nya.

b. Pelaksanaan kegiatan

Informan Dinas DLHK

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Adil Putra ST,MT selaku Kabid Bidang Pengelolaan Sampah sebagai berikut :

“Dinas DLHK juga memiliki satuan tugas yang bertugas untuk masalah sampah. Satuan tugas dibagi ke berbagai kecamatan dan kelurahan. Khusus kecamatan tampan ada 29 orang petugas dan 10 truk pengangkut sampah.” (Senin, 13 juli pukul 09.00 wib)

Responden Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan informan Bapak Yusran selaku masyarakat Kecamatan Tampan sebagai berikut :

“Sejauh ini yang saya liat. Memang Dinas PUPR dan dinas DLHK sudah melaksanakan tugas nya dengan cukup baik, yaitu dengan menurunkan satuan tugas ke berbagai daerah. Hanya saja tingkat kesadaran masyarakat terhadap sampah masih sangat rendah sehingga itulah menjadi penyebab banjir.”(Kamis, 16 juli pukul 16.30 wib)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pedoman sesuai dengan standar SOP yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada simpang siur dalam melaksanakan tugas.

c. Sanksi

Informan Dinas DLHK

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Nofan Serwanto ST selaku Kasi Bidang Pengelolaan Sampah sebagai berikut :

“Tidak ada yang namanya sanksi dalam koordinasi ini, kami hanya saling berkoordinasi dan membantu satu sama lain. Hanya ada sanksi bagi masyarakat yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.”(Senin, 13 juli pukul 10.30 wib)

Responden Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Yusran selaku masyarakat Kecamatan Tampan sebagai berikut :

“Sebenarnya sanksi itu memang ada, namun masyarakat saja yang belum mematuhi peraturan yang telah dibuat. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan kurangnya kesadaran dalam hal ini.”(Kamis, 16 juli pukul 15.30 wib)

Berdasarkan wawancara tersebut, menjelaskan bahwa dalam koordinasi ini tidak ada sanksi bagi kedua Dinas tersebut. karena juga tidak ada kesepakatan yang begitu spesifik, sehingga sanksi pun jua tidak ada.

d. Insentif

Informan Dinas DLHK

Berdasarkan wawancara dengan infroman yaitu Bapak Nofan Serwanto ST selaku Kasi Bidang Pengelolaan Sampah sebagai berikut :

“Karena Dinas DLHK dan Dinas PUPR saling berkaitan terkait banjir, memang seharusnya kami saling berkoordinasi dan bekerja sama, jadi tidak ada pemberian insentif atau semacamnya.” (Senin, 13 juli pukul 10.30 wib)

Dalam koordinasi ini tidak terdapat insentif, karena kedua Dinas hanya menjalankan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori oleh Handyaningrat (1985: 88), indikator kesepakatan, kesempatan dan insentif diukur dari adanya kesepakatan, adanya pelaksanaan kegiatan, sanksi dan insentif. Dalam koordinasi ini, tidak ada kesepakatan yang begitu mengikat karena kedua dinas hanya saling berbagi informasi dan melaksanakan tugas masing-masing, adanya pelaksanaan kegiatan oleh kedua dinas tersebut yang langsung turun ke lapangan. Tetapi dalam koordinasi ini tidak ada sanksi dan insentif yang diberikan.

5. Kontinuitas Perencanaan

a. Umpan balik

Informan Dinas DLHK

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Nofan Serwanto ST selaku Kasi Bidang Pengelolaan Sampah sebagai berikut :

“Kami tidak pernah berhenti melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap sampah. Walaupun belum sepenuhnya berhasil, tetapi kami selalu berusaha untuk mengatasi masalah sampah. Ada faktor-faktor lain juga yang menyebabkan masyarakat lalai terhadap sampah.” (Senin, 13 juli pukul 10.30 wib)

Responden Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Yusran selaku masyarakat Kecamatan Tampan sebagai berikut :

“Koordinasi yang dilakukan kedua dinas tersebut belum mendapat umpan balik yang positif dari masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan yang dibuat, seperti contoh membuang sampah sembarangan ke dalam drainase, pembangunan pertokoan yang menutupi jaringan drainase dan sulit nya mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi banjir.” (Kamis, 16 juli pukul 15.30 wib)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, umpan balik dari koordinasi ini sudah mulai dirasakan sebagian masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang sudah mulai paham dan mematuhi peraturan yang telah dibuat, dan masih ada sebagian yang tidak mau tau.

- b. Perubahan dari hasil kesepakatan

Informan Dinas DLHK

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Adil Putra ST,MT selaku Kabid Bidang Pengelolaan Sampah sebagai berikut :

“Karena koordinasi ini kami selalu mendapat informasi dari Dinas PUPR dimana saja titik-titik banjir yang penyebab nya adalah sampah. Dengan begitu, mempermudah kami dalam menurunkan satuan tugas ke titik tersebut dan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk di kaji kembali.”
(Senin, 13 juli pukul 09.00 wib)

Responden Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Bapak Yusran selaku masyarakat Kecamatan Tampan sebagai berikut :

“Perubahan yang kami rasakan belum memuaskan. Meskipun kedua dinas tersebut sudah melakukan tugas nya dengan cukup baik, tetapi banjir masih saja sulit di atasi. Mungkin belum sepenuhnya berhasil, tetapi kedua dinas tersebut sudah meminimalisir terjadi nya banjir.” (Kamis, 16 juli pukul 17.00 wib)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, perubahan dari koordinasi ini mulai memberikan dampak positif. Yaitu kedua Dinas tersebut sudah berhasil meminimalisir beberapa titik banjir, meskipun belum sepenuhnya berhasil menangani banjir, tetapi kedua Dinas sudah berusaha melakukan yang terbaik.

Menurut teori oleh Handayani (1985: 88), terdapat indikator kontinuitas perencanaan dalam koordinasi, item yang dinilai adalah umpan balik dan perubahan dari hasil kesepakatan. Pada indikator ini adanya umpan balik dan perubahan positif dari koordinasi yang dilakukan, yaitu Dinas PUPR terbantu oleh Dinas DLHK dalam menangani banjir. Namun kedua dinas tersebut masih harus terus melakukan sosialisasi/himbauan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

C. Analisis Hasil Penelitian Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Menangani Masalah Banjir Di Kecamatan Tampan

Menurut teori oleh Handyaningrat (1985: 88), keberhasilan koordinasi dapat diukur dari 5 indikator yaitu, Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan dan Insentif serta Kontinuitas Perencanaan.

Adapun proses koordinasi Dinas PUPR dengan Dinas DLHK dalam menangani masalah banjir di Kecamatan Tampan adalah sebagai berikut :

Proses Koordinasi Dinas PUPR

1. Komunikasi

Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam koordinasi, komunikasi adalah hal yang paling pertama dan utama. Karena dengan komunikasi bisa berbagi informasi dan bertukar pendapat. Dalam koordinasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR dengan Dinas DLHK, bentuk komunikasi yang dilakukan adalah berbagi informasi secara langsung/pertemuan (rapat) dan menggunakan teknologi informasi. Seperti berbagi informasi melalui email, whatsapp dan forum kajian. Komunikasi biasanya dilakukan minimal sebulan sekali, dan tidak menentu tergantung pada kondisi. Penilaian pada indikator komunikasi sudah terlaksana.

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Koordinasi juga didasarkan atas rasa kesadaran butuh nya bekerja sama dengan pihak lain agar berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Karena dengan bekerja sendiri tidak mampu atau belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, karena itu perlu nya koordinasi dilakukan dengan instansi lain yang terkait. Dalam koordinasi Dinas PUPR dengan Dinas DLHK, Dinas PUPR meminta kerjasama dari Dinas DLHK yaitu untuk menangani permasalahan sampah yang ada di drainase. Drainase memang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR, baik dalam hal menguras, menggali, dan membersihkan, tetapi sampah yang ada di dalam drainase seharusnya menjadi tanggung jawab Dinas DLHK. Penilaian pada indikator kesadaran penting nya koordinasi sudah terlaksana.

3. Kompetensi Partisipan

Melakukan koordinasi, tentu nya ada pihak-pihak yang terlibat yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi. Bukan hanya satu instansi, tapi ada banyak instansi yang ikut terlibat. Seperti dalam menangani masalah banjir di Kecamatan Tampan. Bukan hanya tanggung jawab Dinas PUPR dan Dinas DLHK saja, tetapi banyak instansi lain yang ikut berkoordinasi yaitu Kementerian PUPR, BWSS (badan wilayah sungai sumatera), Dinas PU Provinsi, Dinas Permukiman, Pemerintah Kabupaten/Kota. Karena banjir cakupan nya luas, oleh karena itu harus dibantu oleh instansi yang berhubungan dengan banjir. Koordinasi tersebut bertujuan agar membantu dan mendukung Dinas PUPR selaku penanggung jawab terhadap penataan infrastruktur dan tata ruang agar

berhasil menangani permasalahan banjir. Penilaian pada indikator kompetensi partisipan sudah terlaksana.

4. Kesempatan, Kesepakatan dan Insentif

Dalam koordinasi Dinas PUPR dengan Dinas DLHK dalam menangani masalah banjir tidak terdapat kesepakatan yang begitu spesifik, bahkan tidak ada program atau kegiatan kolaborasi dari kedua dinas tersebut. Bentuk kesepakatan yang dilakukan hanya saling berbagi informasi dan rutin mengadakan rapat/pertemuan untuk membahas permasalahan banjir. Sedangkan tugas dan fungsi Dinas dilakukan masing-masing. Dinas PUPR fokus terhadap drainase dan Dinas DLHK fokus terhadap sampah yang menjadi penyebab drainase tersumbat sehingga menyebabkan banjir. Bahkan dalam koordinasi ini tidak ada sanksi dan insentif yang diberikan karena tujuan koordinasi adalah untuk menangani banjir dan masing-masing Dinas hanya melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2016 untuk Dinas PUPR dan Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2016 untuk Dinas DLHK. Penilaian pada indikator cukup terlaksana, karena tidak ada kesepakatan yang begitu mengikat karena kedua dinas hanya saling berbagi informasi dan melaksanakan tugas masing-masing, adanya pelaksanaan kegiatan oleh kedua dinas tersebut yang langsung turun ke lapangan. Tetapi dalam koordinasi ini tidak ada sanksi dan insentif yang diberikan.

5. Kontinuitas Perencanaan

Perencanaan berkelanjutan juga sangat penting dalam berkoordinasi. Karena dengan memiliki perencanaan yang baik, kemudian perencanaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR dengan Dinas DLHK harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan, karena kedua Dinas tersebut saling berhubungan dalam menangani permasalahan banjir. Perencanaan berkelanjutan bertujuan agar lebih terarah dan tepat sasaran dalam mencapai tujuan. Dalam kasus ini, banjir terus terjadi setiap tahun nya, karena itu kedua Dinas tersebut tidak boleh lepas dari koordinasi dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perencanaan juga diharapkan mampu memberikan umpan balik atau perubahan dari apa yang telah dilaksanakan dalam menangani banjir setiap tahunnya. Penilaian pada indikator kontinuitas perencanaan adalah sudah terlaksana.

Proses Koordinasi Dinas DLHK

1. Komunikasi

Dalam koordinasi ini komunikasi yang dilakukan oleh Dinas DLHK dengan Dinas PUPR adalah dengan melakukan rapat atau pertemuan. Untuk berbagi informasi, Dinas PUPR selalu memberikan informasi terbaru tentang data banjir, biasanya dilakukan melalui via email, whatsapp atau forum. Informasi dan data yang didapat Dinas DLHK dari Dinas PUPR kemudian diproses untuk ditinjau. Dinas DLHK akan turun ke titik-titik banjir tersebut untuk melaksanakan

tugasnya yaitu membersihkan sampah yang tersumbat di drainase. Komunikasi yang dilakukan Dinas DLHK dengan Dinas PUPR dilakukan setiap bulan nya, jadwal ini bisa berubah-ubah tergantung kepada kondisi, seperti saat musim hujan di akhir tahun yang kerap kali terjadi banjir. Pada saat musim hujan, kedua Dinas tersebut bekerja ekstra dalam menangani masalah banjir.

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Pada dasarnya sampah memang menjadi tanggung jawab Dinas DLHK, karena itu Dinas PUPR tidak memiliki tanggung jawab atas sampah yang tersumbat di drainase. Oleh karena itu Dinas DLHK perlu membantu Dinas PUPR dalam menangani masalah tersebut. Koordinasi dilakukan juga didasari atas kesadaran masing-masing Dinas akan tugas dan tanggung jawabnya yang telah di atur dalam Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah.

3. Kompetensi Partisipan

Setiap organisasi pasti memiliki sumber daya manusia (SDM) untuk menjalankan organisasi tersebut. Dinas DLHK memiliki SDM yang cukup banyak dengan bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas DLHK terdiri atas empat bidang, dan yang terlibat dalam koordinasi dengan Dinas PUPR adalah bidang pengelolaan sampah. Bidang pengelolaan sampah terdiri dari kepala bidang, kepala seksi, pegawai lainnya, dan satuan tugas lapangan. Setiap individu dalam bidang ini sudah memahami tugasnya dalam mencapai tujuan. Bukan hanya Dinas DLHK yang terlibat dalam penanganan banjir, tetapi banyak instansi lain yang juga ikut terlibat seperti Kementerian PUPR, BWSS (badan

wilayah sungai sumatera), Dinas PU Provinsi, Dinas Permukiman, Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Kesempatan, Kesepakatan dan Insentif Koordinasi

Koordinasi antar Dinas DLHK dengan Dinas PUPR tidak memiliki kesepakatan yang begitu spesifik, tidak memiliki peraturan yang mengikat dan juga tidak ada sanksi. Karena koordinasi dilakukan untuk saling berbagi informasi, kemudian melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Dalam koordinasi Dinas DLHK dengan Dinas PUPR juga tidak ada insentif, karena kedua Dinas tersebut tidak memiliki program atau kegiatan yang dibuat bersama. Dan kedua Dinas hanya berpedoman kepada tugas dan fungsi dalam Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Jika saja kedua Dinas memiliki sebuah program yang dibuat bersama dan dijalankan bersama-sama, maka penanganan banjir bisa menjadi lebih efektif, karena dengan adanya program atau kegiatan khusus yang dibuat untuk menangani masalah banjir akan lebih terfokus dan akan mengalami peningkatan atau perubahan dari tahun sebelumnya.

5. Kontinuitas Perencanaan

Perencanaan berkelanjutan akan terus dilakukan oleh Dinas DLHK dan Dinas PUPR agar benar-benar bisa menangani permasalahan banjir yang terus terjadi setiap tahunnya. Koordinasi harus tetap berjalan, karena kedua Dinas tersebut saling berdampingan dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam menangani masalah banjir. Perencanaan penanganan masalah banjir juga

termasuk ke dalam perencanaan jangka panjang yang akan terus di evaluasi setiap tahun nya. Kedua Dinas sangat berperan dalam menangani masalah banjir, masyarakat juga harus ikut dan juga mendukung upaya yang telah dilakukan pihak-pihak yang terlibat agar mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kota yang bebas banjir dan genangan. Hal ini telah di atur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/Prt/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Tabel V.5 : Hasil dan Temuan Penelitian

Teori	Indikator	Sub Indikator	Hasil Dan Temuan Penelitian
Handayani (1985: 88), Koordinasi adalah usaha penyesuaian dari bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan dari bagian-bagian itu dapat selesai tepat pada waktunya, sehingga masing-masing anggota dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar diperoleh hasil secara keseluruhan.	1) Komunikasi	a) Informasi b) Alur Informasi c) Pemanfaatan Teknologi Informasi	- Adanya informasi dalam koordinasi Dinas PUPR dan Dinas DLHK, informasi meliputi data-data banjir dan titik banjir di Kecamatan Tampan. - Alur informasi dalam koordinasi Dinas PUPR dan Dinas DLHK yaitu melalui pertemuan atau rapat, forum kajian, via whatsapp, email. - Adanya pemanfaatan teknologi dalam melakukan

			koordinasi, seperti menggunakan komputer saat rapat, berbagi informasi melalui media sosial seperti email dan whatsapp.
	2) Kesadaran Pentingnya Koordinasi	a) Tingkat Pengetahuan Pelaksana b) Tingkat Keselarasan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya bidang-bidang yang menangani sesuai dengan fungsinya. Bidang tersebut memiliki kepala bidang, kepala seksi, anggota staff dan tim satuan tugas yang bekerja turun ke lapangan untuk mengatasi permasalahan banjir. Setiap masing-masing petugas sudah memahami akan tugas masing-masing. - Pelaksanaan tugas masing-masing Dinas, yaitu Dinas PUPR bertanggung jawab atas drainase dan Dinas DLHK bertanggung jawab atas sampah.
	3) Kompetensi Partisipan	a) Adanya Pejabat yg Berwenang	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pihak-pihak lain atau instansi-instansi lain yang ikut berkoordinasi dalam menangani masalah banjir, yaitu Kementerian PUPR, BWSS (badan wilayah

		b) Adanya Ahli di Bidang Pembangunan	<p>sungai sumatera), Dinas PU Provinsi, Dinas Permukiman, Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ahli di bidang pembangunan adalah tanggung jawab Dinas PUPR dibantu oleh Dinas PU Provinsi dan Kementerian PUPR.
	4) Kesempatan, Kesepakatan, dan Insentif Koordinasi	<p>a) Kesepakatan</p> <p>b) Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>c) Sanksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada kesepakatan yang begitu spesifik, dan tidak ada program/kegiatan/kolaborasi yang dikerjakan bersama, masing-masing dinas hanya melaksanakan tugasnya dan kesepakatan yang dilakukan hanya saling berbagi informasi terkait banjir. - Adanya kegiatan rutin yang dilakukan oleh kedua Dinas tersebut, yaitu pembersihan drainase oleh Dinas PUPR, dan mengangkut sampah yang berasal dari drainase. - Tidak adanya sanksi dalam koordinasi tersebut.

		d) Insentif	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat insentif, karena koordinasi dilakukan karena saling bergantung dan saling membutuhkan dalam menangani masalah banjir.
	5) Kontinuitas Perencanaan	<p>a) Umpan Balik</p> <p>b) Perubahan Dari Hasil Kesepakatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum sepenuhnya memberikan kesadaran terhadap masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. - Berkat koordinasi yang dilakukan Dinas PUPR dengan Dinas DLHK, berhasil menuntaskan 13 titik banjir pada tahun 2019. - Namun masyarakat belum merasakan perubahan sepenuhnya, karena masih kurangnya sosialisasi dan penindakan langsung sesaat setelah banjir terjadi, kedua Dinas tersebut hanya bisa meminimalisir terjadinya banjir.

Pola koordinasi yang dilakukan Dinas PUPR dengan Dinas DLHK adalah koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Masing-masing Dinas memiliki bidang-bidang tertentu, bidang tersebut terdiri dari Kepala Bidang, Kepala Seksi,

pegawai dan satuan tugas lapangan. Koordinasi vertikal adalah koordinasi antara pemimpin dengan bawahannya, pemimpin akan mengatur dan mengarahkan setiap bawahannya dalam melakukan tugas. Hal ini diterapkan oleh Dinas PUPR dan Dinas DLHK. Sedangkan koordinasi horizontal adalah koordinasi yang dilakukan dengan pihak atau instansi lain yang berhubungan atau setingkat. Seperti yang dilakukan oleh Dinas PUPR dengan Dinas DLHK dalam menangani masalah banjir di Kecamatan Tampan.

Ketika sedang terjadi banjir, masyarakat yang terkena banjir akan di evakuasi dan dibantu oleh badan penanggulangan bencana daerah. Badan ini bertanggung jawab atas pengevakasian masyarakat. BPBD menyediakan tenda pengungsian, perahu karet untuk evakuasi, dan personel yang siap siaga. Sedangkan Dinas PUPR bertugas meminimalisir sebelum terjadinya banjir yaitu dengan menangani sungai, anak sungai, saluran drainase primer dan sekunder.

Koordinasi akan terus berlanjut, karena sudah termasuk ke dalam program jangka panjang. Karena pembangunan Master Plan penanganan banjir butuh waktu dan dana yang cukup banyak, sehingga kedua Dinas tersebut akan selalu berdampingan hingga pembangunan selesai dan berhasil mengatasi banjir.

Dalam penelitian Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dalam menangani masalah banjir cukup terlaksana. Namun perlu kerjasama dan kesadaran dari masyarakat agar benar-benar bisa menuntaskan masalah banjir di Kecamatan Tampan. Karena kesadaran masyarakat terhadap kebersihan

lingkungan masih kurang, hal ini menjadi penyebab terhambatnya penanganan banjir. Meskipun kedua dinas tersebut sudah berupaya semaksimal mungkin, tidak akan berhasil jika masyarakat tidak ikut berpartisipasi. Belum adanya Master Plan penanganan banjir, dan minimnya anggaran rasionalisasi banjir juga menjadi penghambat dalam penanganan banjir. Sangat penting melakukan pembangunan master plan dan perlunya peran dari masyarakat agar benar-benar bisa menuntaskan masalah banjir.

Beberapa faktor sebagai penyebab banjir di Kecamatan Tampan adalah :

1. Parit-parit tidak terhubung dengan baik satu sama lain. Hal ini ditimbulkan sebagian besar lantai padat yang tak rata lantaran mengikuti kontur tanah yg naik sehingga air tidak konsisten ke parit besar dan menyebabkan air meluap. Tidak konsistennya lantai parit menggiring air asal banjir menyebabkan air meluap karena terputus mencapai parit besar.
2. Kurangnya ruang resapan air dan dampak semenisasi. Dimana tanah yang berfungsi sebagai asal resapan air banyak disemenisasi sebagai akibatnya Kota Pekanbaru tidak mempunyai ruangan resapan air yg cukup baik. hampir seluruh kawasan pada kota Pekanbaru seperti depan ruko, depan rumah, hingga bahu jalan pun di semenisasi sehingga tidak ada resapan air nya.
3. Saluran Drainase tersumbat oleh sampah yg terbawa sirkulasi air. kebiasaan masyarakat membuang sampah asal-asalan terbukti Mengganggu proses drainase dan sirkulasi air.

4. Masih lemahnya koordinasi antara Dinas PUPR dengan Dinas DLHK serta belum adanya kesepakatan yang jelas. Tidak ada program atau kegiatan yang dibuat secara bersama atau dikerjakan bersama, sehingga koordinasi yang dilakukan belum maksimal.

Beberapa faktor penghambat dalam koordinasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR dengan Dinas DLHK adalah sebagai berikut :

1. Kurang jelasnya prosedur dan tata kerja yang tidak diketahui oleh semua pihak dalam usaha kerjasama. Seperti tidak adanya program/kegiatan yang dikerjakan secara bersama oleh kedua Dinas tersebut.
2. Masing-masing Dinas hanya mementingkan tugas sendiri, koordinasi hanya sebatas berbagi informasi.
3. Tidak adanya rumusan wewenang tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pimpinan satuan organisasi. Sehingga tidak semua pihak tau dan paham terhadap koordinasi yang dilakukan.

D. Faktor –Faktor Yang Menyebabkan Buruk Nya Sistem Drainase

1. Menurut Dinas PUPR

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan.
- b. Kurangnya daerah resapan akibat pertumbuhan permukiman.
- c. Banyaknya saluran drainase yang tertutup oleh proses pembangunan pertokoan.
- d. Penyempitan dan pendangkalan saluran/sungai

- e. Pasang dari air laut yang terjadi bersamaan dengan curah hujan yang tinggi menyebabkan muka air Sungai di Pekanbaru juga ikut naik sehingga menyebabkan banjir.
- f. Sebagian drainase lebih tinggi dari bahu jalan sehingga air tidak mampu mencapai drainase dan tergenang di pinggir jalan.

2. Menurut Dinas DLHK

- a. Kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah ke drainase dan sungai.
- b. Kurangnya kesadaran atau rasa takut dari masyarakat pada peraturan yang telah ditetapkan beserta sanksi dan denda bagi pelanggar peraturan tersebut. Meskipun peringatan dan himbauan telah banyak dibuat di berbagai daerah oleh Dinas DLHK.
- c. Banyaknya drainase yang rusak atau hancur.
- d. Sulitnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena tidak memberikan hasil yang positif.

E. Faktor Penghambat Dan Upaya Untuk Mengatasi Permasalahan Banjir Di Kota Pekanbaru

1. Faktor Penghambat

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan.
- b. Pembangunan pemukiman dan pertokoan yang tidak mengindahkan aturan yang berlaku.
- c. Minimnya anggaran akibat rasionalisasi untuk program pengendalian banjir.

- d. Belum adanya master plan penanganan banjir.
2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas PUPR
 - a. Pelaksanaan program mengatasi banjir yaitu dengan melakukan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya oleh Dinas PUPR.
 - b. Pembersihan rutin drainase oleh Dinas PUPR.
 - c. Pengawasan dan evaluasi drainase setiap bulan nya.
 3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas DLHK
 - a. Pemeliharaan dan pengawasan sampah pada titik-titik banjir.
 - b. Dinas DLHK terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan berdasarkan pada peraturan walikota.
 - c. Rutin melakukan pembersihan lingkungan oleh satuan tugas lapangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu dengan judul “Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Menangani Masalah Banjir Di Kecamatan Tampan”, maka bisa ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

- 1) Penilaian terhadap koordinasi yang dilakukan Dinas PUPR dengan Dinas DLHK dalam mengatasi banjir di Kecamatan Tampan “cukup terlaksana”.
- 2) Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya banjir di Kota Pekanbaru. Faktor yang paling umum adalah kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah ke drainase, drainase yang buruk/belum selesai di bangun serta rendahnya anggaran rasional untuk mengatasi banjir. Faktor-faktor tersebut lah yang menyebabkan banjir di Kota Pekanbaru sulit di atasi setiap tahun nya. Banjir hanya bisa di minimalisir, tidak bisa di atasi sepenuhnya. Peran Dinas PUPR dan Dinas DLHK sangat penting dan harus bekerja sama dengan masyarakat agar bisa mengatasi banjir yang terjadi setiap tahun nya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang di dapatkan oleh penulis, tentu nya ada beberapa kelemahan atau kekurangan koordinasi yang dilakukan Dinas PUPR dan Dinas DLHK yang perlu di perbaiki untuk ke depan nya. Adapun saran yang diberikan penulis terkait dengan penelitian yang telah dilakukan penulis adalah sebagai berikut

- 1) Tidak ada program/kegiatan bersama antara Dinas PUPR dan Dinas DLHK, karena masing-masing Dinas bekerja sendiri sesuai dengan fungsinya, sehingga memberikan efek terhadap koordinasi yang dilakukan tidak maksimal. Seharusnya kedua Dinas tersebut memiliki program/kegiatan yang memang dilaksanakan bersama sehingga koordinasi bisa terlaksana dengan baik.
- 2) Koordinasi yang dilakukan hanya sebatas berbagi informasi dalam pertemuan atau rapat, koordinasi seperti ini tidaklah efektif tanpa adanya sebuah perencanaan atau program yang memang dikerjakan bersama, seperti kolaborasi antara Dinas PUPR dan Dinas DLHK.
- 3) Selain berkoordinasi dengan instansi terkait, koordinasi dengan masyarakat juga harus ditingkatkan lagi. Perlu kerjasama dan dukungan dari masyarakat agar koordinasi yang dilakukan memberikan hasil yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. *Administrasi dan manajemen umum*. Jakarta: Ghalia
- Badudu-Zain, 1994. *Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta.
- Cholih, Abdull, 2011, *Pengantar Manajemen*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa
- Draft, Richard L, 2009. *Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat
- Faustino, Cardoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset
- Handyaningrat, Soewarno (1985). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Cetakan Keenam. Jakarta: PT. Pustaka Setia
- Handoko, T. Hani, 2003. *Manajemen*. Yogyakarta, BPFE.
- Handoko, T. Hani, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, BPFE.
- Hasibuan, Malayu S.P., 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P., 2009. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu S.P., 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ignatius, Wursanto. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, Andi Yogyakarta. Yogyakarta
- Manullang, 2008, *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI)
- Sadili, Samsudin. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Silalahi, Ulberts. 1989. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: CV. Sinar Jaya
- Sjamsuddin indradadi, Sjamjiar. 2016. *Dasar-Dasar Dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Sofyandi, Herman. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Sudaryono, 2018. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT.Rajagrafindo Persada
- Suripin. 2004. *Sistem Drainase Yang Berkelanjutan*. Penerbit Andi Offset,
- Suprayogi, Hari, dkk. 2019. *Indeks Drainase Dan Banjir Perkotaan*. Buku Kompas, Jakarta

- Sutrisno, E. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan ke: empat. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Stoner, James A.F. 2006, Manajemen, Terjemahan: Antarikso, dkk, Erlangga, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Syafeii, Inu Kencana. 2006. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta : Grasindo
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung:Alfabeta
- R. Terry, George dan Leslie W. Rue. (2014). *Dasar-dasar Manejemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Robbins, Stephen dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. jakarta: salemba empat
- Robbins, Stephen P, 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*, Alih Bahasa Jusuf Udaya, Jakarta, Arcan
- Tarmizi, Hendry, 2015. *Perilaku Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Toha, Miftah. 2003. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. 2002. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada
- Yohanes. Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press
- Zulkifli, dkk, 2013. *Buku Pedoman Penulisan*. Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol UIR
- Dokumen :
- SK menteri PU No. 233 tahun 1987.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2008
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tentang Drainase.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraann Sistem Drainase Perkotaan.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru 2007-2026.

Jurnal online :

Winda witami, 2017. *Koordinasi Dinas Perhubungan Dengan Satpol PP Dalam Memfungsikan Pedestrian Di Kota Pekanbaru.*

JOM FISIP Vol. 4 No. 2.

<https://media.neliti.com/media/publications/208578-koordinasi-dinas-perhubungan-dengan-satu.pdf>.

Ni Enda Wijayati K.M, 2016. *Koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dan Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru.*Jom FISIP Volume 3 No.2. <https://media.neliti.com/media/publications/33171-ID-koordinasi-dinas-pendapatan-daerah-kota-pekanbaru-dan-dinas-tata-ruang-dan-bangu.pdf>

Skripsi :

Fidaus, Alli, 2016. *Koordinasi Pemkot Dan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Kota Bandar Lampung Dalam Memberikan Pelayanan di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (Disbertam) Dan Pt Pln (Persero) Dalam Pengelolaan Lampu Jalantahun 2015),* Universitas Lampung.

Nugroho, Nurul Fitri, 2016. *Koordinasi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (DISPERINDAG) Dalam Memberdayakan Pengrajin Daur Ulang Sampah Plastik Di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.* Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.